



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH PADA  
KANTOR CAMAT KECAMATAN DATUK  
BANDAR KOTA TANJUNG BALAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**GUNAWAN SIHOMBING**  
1615100162

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2021**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : GUNAWAN SIHOMBING  
NPM : 1615100162  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL : PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN DATUK  
BANDAR KOTA TANJUNG BALAI

Medan, Januari 2021

**Ketua Program Studi**

(Dr. Rahima br. Purba, SE., M. Si., Ak., CA)



(Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM)

**Pembimbing I**

(Junawan, SE., M. Si)

**Pembimbing II**

(Suwarno, SE., MM)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN**

**SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN  
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI,  
MEDAN**

**PENGESAHAN UJIAN**

**NAMA : GUNAWAN SIHOMBING  
NPM : 1615100162  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL : PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI  
DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH  
TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN DATUK  
BANDAR KOTA TANJUNG BALAI**

Medan, Januari 2021



**Ketua**  
(Dr. Rahma br. Purba, SE., M. Si., Ak., CA)

**Anggota II**  
(Suwarno, SE., MM)

**Anggota I**

(Junawan, SE., M. Si)

**Anggota III**

(Anggi Pratama Nasution SE, M.Si)

**Anggota IV**

(Vina Arnita SE, M.Si)

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : GUNAWAN SIHOMBING  
NPM : 1615100162  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S1 (STRATA SATU)  
JUDUL : PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR  
CAMAT KECAMATAN DATUK BANDAR KOTA TANJUNG  
BALAI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Januari 2021



nulis

Gunawan Sihombing  
NPM: 1615100162

*Ace Sidiang*  
*20/11/2020*

*Ace Sidiang*  
*Suwarno 26/11*



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN STANDAR  
AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH PADA KANTOR CAMAT KECAMATAN  
DATUK BANDAR KOTA TANJUNG BALAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

**GUNAWAN SIHOMBING**  
1615100162

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2020**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

as : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : Junaidan Se. M.Si  
 Pembimbing II : Suwarno Se. MM  
 Mahasiswa : GUNAWAN SIHOMBING  
 Program Studi : Akuntansi  
 NIM (Nomer Pokok Mahasiswa) : 1615100162  
 Pendidikan : S1 (Strata satu)  
 Tugas Akhir/Skripsi : Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi  
 Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada  
 Kantor Camat Kecamatan Dabuk Bandar Kota Tanjung Balai

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2020	- Langkah Dalam Melakukan Audit Keuangan	f	
	- Langkah dalam Audit Output Spss	f	
2020	Free Uji regresi	f	

Medan, 19 November 2020  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571  
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id  
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Pembimbing I : .....  
 Pembimbing II : .....  
 Mahasiswa : GUNAWAN SIHOMBING  
 Program Studi : Akuntansi  
 Pokok Mahasiswa : 1615100162  
 Pendidikan : .....  
 Tugas Akhir/Skripsi : .....

WAKTU	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
11-2020	Perbaikan kata Pengantar, Pejabat baru Dekan dan Ka. Prodi	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
-	Perbaiki Abstrak	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
-	Perbaiki Rencana penelitian sumbernya dari mana.	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
-	Tambahkan lembar pengesahan dan persetujuan Ujian	<i>[Signature]</i>	Perbaiki
-	Tambahkan surat pernyataan tidak plagiat dan hasil karya sendiri	<i>[Signature]</i>	Tambahkan
-	Acc Sidang		
	Acc judul	<i>[Signature]</i> 16/12/2020 Suwarno	

Medan, 19 November 2020  
 Diketahui/Disetujui oleh :  
 Dekan,



Dr. Bambang Widjanarko,

**SURAT BEBAS PUSTAKA  
NOMOR: 3367/PERP/BP/2020**

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan saudara/i:

: GUNAWAN SIHOMBING

: 1615100162

Semester : Akhir

: SOSIAL SAINS

Studi : Akuntansi

Sejak terhitung sejak tanggal 10 Desember 2020, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku perpustakaan legi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 10 Desember 2020

Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan,

  
Sugianto, S.Sos., S.Pd.I



Medan, 10 Desember 2020  
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
Fakultas SOSIAL SAINS  
UNPAR Medan  
Di -  
Tempat

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : GUNAWAN SIHOMBING  
Tgl./Tgl. Lahir : TEMBUNG / 22 Maret 1995  
Orang Tua : RAMLI SIHOMBING  
No. Identitas : 1615100162  
Jurusan : SOSIAL SAINS  
Bidang Studi : Akuntansi  
No. Kontak : 082161788004/08  
Alamat : DUSUN IX JL BERINGIN GG RAMBE PASAR VII TEMBUNG

Perini bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skrripsi sudah di jilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang bertaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Telah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Tersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,100,000</b>

Ukuran Toga : **M**

Disetujui oleh :



Widjanarko, SE., MM.  
Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



GUNAWAN SIHOMBING  
1615100162

Perini permohonan ini sah dan berlaku bila ;  
a. Telah tercap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAR Medan.  
b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan  
c. Lembar Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

## SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



Faisli Muhammad Ritonga, BA., MSc

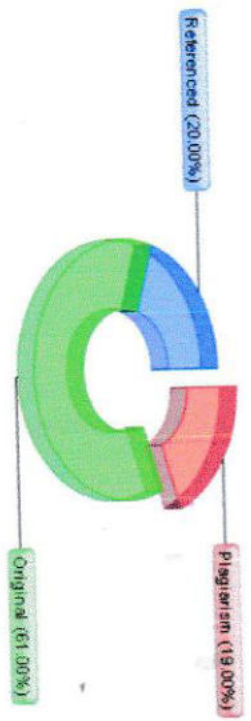
Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi	: 00	Tgl Eff	: 23 Jan 2019
-------------------------	--------	------	---------	---------------

# Plagiarism Detector v. 1460 - Originality Report 01-Dec-20 15:05:10

Analysed document: GUNAWAN SIHOMBING\_1615100162\_AKUNTANSI.docx Licensed for Universitas Pembangunan Panca Budi\_License03

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Relation chart



Distribution graph



Top sources of plagiarism:

- Words:** 28 **A size:** [https://repository.ukw.edu/index.php/doi/10.23200/0907\\_Fur%20dod](https://repository.ukw.edu/index.php/doi/10.23200/0907_Fur%20dod)
- Words:** 19 **A size:** <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/jurnal/index/doi/10.1523/1693>
- Words:** 16 **A size:** <http://ip.feb.unsoed.ac.id/index.php/jurnal/index/view/Full/109/1/1245>

[Show other Sources]

Processed resource details:

91 - OK / 19 - Failed

[Show other Sources]



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)  
(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR\*

bertanda tangan di bawah ini :

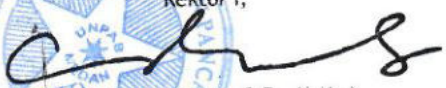
ngkap : GUNAWAN SIHOMBING  
Tgl. Lahir : TEMBUNG / 22 Maret 1995  
kok Mahasiswa : 1615100162  
Studi : Akuntansi  
al : Akuntansi Sektor Publik  
edit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.45  
 : 082161788004  
mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

### Judul


engaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat  
amatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

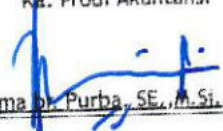
idak Perlu

Rektor I,  
  
( Cahyo Pramono, S.E., M.M. )

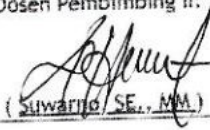
Medan, 02 Desember 2020

Pemohon,  
  
( Gunawan Sihombing )

Tanggal : .....  
Disahkan oleh :  
Dekan  
  
( Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM. )

Tanggal : .....  
Disetujui oleh :  
Ka. Prodi Akuntansi  
  
( Dr. Rahima Purba, SE., M.Si., Ak., CA. )

Tanggal : .....  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing I :  
  
( Junawan, SE., M.Si )

Tanggal : .....  
Disetujui oleh :  
Dosen Pembimbing II :  
  
( Suwanto, SE., MM. )

Dokumen: FM-UPBM-18-02      Revisi: 0      Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



**PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN  
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA  
KANTOR CAMAT KECAMATAN DATUK  
BANDAR KOTA TANJUNG BALAI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

**Oleh :**

**GUNAWAN SIHOMBING**  
1615100162

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
MEDAN  
2020**

*Judul  
16/02/2021*

*Ace valid  
16/2021*

## **ABSTRAK**

Keberhasilan lembaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penggerak roda pemerintahan dan pengembangan masyarakat di wilayah kerjanya dilihat dari kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan. Mengukur kinerja instansi pemerintah tersebut diukur dari pertanggungjawabannya menggunakan APBD. Unsur penilaian kinerja meliputi laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi yang dijalankan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dilakukan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang merupakan aparatur Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Analisa data dilakukan dengan regresi linier, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah secara parsial maupun simultan.

Kata Kunci : Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah, Kinerja Instansi Pemerintah

## **ABSTRACT**

*The success of government institutions in carrying out their duties and responsibilities as a driving force of government and community development in their working areas is seen from the performance of the resulting government agencies. Measuring the performance of these government agencies is measured from their accountability using the APBD. The performance appraisal element includes the financial reports produced by the accounting information system which is implemented based on the Government Accounting Standards and the performance accountability of government agencies. The research which was conducted at the District Camat Offices of Datuk Bandar Kota Tanjung Balai was conducted using an associative quantitative approach. Data collection was carried out by distributing questionnaires to 20 respondents who were apparatus of the District Camat Office of Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Data analysis was performed by linear regression, t-test and F-test. The results showed that the Accounting Information System and Government Accounting Standards had a positive and significant effect on the performance of government agencies partially or simultaneously.*

*Keywords: Accounting Information Systems, Government Accounting Standards, Performance of Government Agencies*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, terima kasih dan syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai”**. Skripsi ini merupakan bagian dari tugas akhir pada program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama melakukan penelitian ini dan penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak Dr. Bambang Widjanarko, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Ibu Dr. Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak. CA, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Junawa, SE., M.Si, selaku Dosen Pembing I
5. Bapak Suwarno, SE., MM, selaku Dosen Pembing II
6. Seluruh staf Pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
7. Bapak Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung beserta seluruh aparatur kecamatan.



8. Teristimewa terima kasih buat kedua orang tua penulis.
9. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memotivasi selama masa perkuliahan maupun saat penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari, isi skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis sangat mengharapkan saran yang membangun, yang membuat skripsi ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karuniaNya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini. Amiin.

Medan, Desember 2020

GUNAWAN SIHOMBING

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>ABSTRACT</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah .....	7
1.3. Rumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.5. Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Kinerja Instansi Pemerintah .....	11
2.1.2. Sistem Informasi Akuntansi .....	20
2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah .....	30
2.2. Penelitian Sebelumnya .....	35
2.3. Kerangka Konseptual .....	36
2.4. Hipotesis .....	38
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Pendekatan Penelitian .....	40
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	40
3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	41
3.4. Populasi dan Sampel .....	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	42
3.6. Teknis Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Hasil Penelitian .....	46
4.1.1. Profil Objek Penelitian.....	46
4.1.2. Struktur Organisasi .....	47
4.1.3. Laporan Kinerja Kantor Camat Datuk Bandar.....	53
4.1.4. Deskripsi Statistik Opini Responden .....	58
4.1.5. Deskripsi Data Penelitian .....	59
4.1.6. Hasil Uji Data Penelitian.....	63
4.2. Pembahasan.....	69
4.2.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .....	74
4.2.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.....	79

4.2.3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah .....	83
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	86
5.2. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	88
<b>LAMPIRAN</b> .....	90

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Realisasi Kinerja Kantor Camat Datuk Bandar .....	6
Tabel 2.1. Penelitian Sebelumnya .....	35
Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian.....	40
Tabel 3.2. Operasionalisasi dan Skala Pengukuran Variabel.....	41
Tabel 4.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Camat Datuk Bandar .....	56
Tabel 4.2. Deskriptif Nilai Rata-rata Opini Responden.....	58
Tabel 4.3. Opini Responden Terhadap Variabel Sistem Informasi Akuntansi .....	60
Tabel 4.4. Opini Responden Terhadap Variabel Standar Akuntansi Pemerintah .....	61
Tabel 4.5. Opini Responden Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah	62
Tabel 4.6. Hasil Uji Validitas Data Penelitian .....	63
Tabel 4.7. Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian.....	64
Tabel 4.8. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov .....	67
Tabel 4.9. Hasil Uji Multikolinearitis .....	68
Tabel 4.10. Koefisien Regresi Linier .....	69
Tabel 4.11. Hasil Uji Parsial (Uji-t).....	71
Tabel 4.12. Hasil Uji Simultan (Uji-F) .....	72
Tabel 4.13. Hasil Uji Determinasi .....	72
Tabel 4.14. Opini Responden Untuk Variabel Sistem Informasi Akuntansi .	77
Tabel 4.15. Opini Responden Untuk Variabel Standar Akuntansi Pemerintah	81

## DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1.	Kinerja Instansi Pemerintah .....	17
Gambar 2.2.	Kerangka Konseptual.....	38
Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan Datuk Bandar ...	48
Gambar 4.2.	Grafik Histogram Normalitas Data.....	65
Gambar 4.3.	Kurva Normal P.Plot.....	66
Gambar 4.4.	Grafik Scatter Plot .....	69

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Instansi pemerintahan daerah merupakan lembaga yang fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Instansi pemerintah ini tidak berorientasi pada pencapaian profit secara material, tetapi lebih kepada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menjunjung tinggi objektivitas dan tanggung jawab. Sumber dana keuangan pemerintah berasal dari masyarakat melalui pungutan pajak, retribusi dan pungutan lainnya. Selanjutnya dana tersebut digunakan untuk kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh instansi pemerintah daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan instansi pemerintah propinsi. Pertanggungjawaban pengelolaan APBD tersebut merupakan salah satu bentuk kinerja instansi pemerintah daerah atau SKPD. Penilaian kinerja SKPD tidak saja diukur secara finansial tetapi juga diukur dari aspek non finansial

Pada dasarnya, kinerja merupakan ukuran hasil kerja yang telah diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2014 memberikan penjelasan yang lebih tegas bahwa “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut di atas, maka untuk dapat mengukur kinerja instansi pemerintah daerah, dapat dilihat sampai sejauh mana instansi pemerintah tersebut dapat mempertanggungjawabkan APBD yang dikelolanya dalam laporan kinerja yang dibuat dan disampaikan. Pencapaian kualitas kinerja instansi pemerintah daerah dikatakan berhasil jika telah memenuhi indikator dan persyaratan kualitas pertanggungjawaban keuangan (APBD) dan laporan kinerja instansi pemerintah daerah tersebut.

Dalam banyak peristiwa, instansi pemerintah mendapatkan hasil audit atas pertanggungjawaban keuangannya dengan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Opini WTP merupakan predikat tertinggi dalam opini audit yang menunjukkan bahwa pertanggungjawaban laporan keuangan telah sesuai dengan prinsip pelaporan dan standar aturan. Dengan hasil yang demikian maka itu artinya kinerja instansi pemerintah daerah telah menghasilkan kinerja yang baik. Adanya risiko kecurangan dalam pemberian opini atas laporan keuangan menjadi alasan pentingnya dilakukan penilaian kinerja, khususnya pertanggungjawaban keuangan instansi pemerintah daerah. Di lain sisi instansi pemerintah daerah intensif mengembangkan pemahaman akuntansi serta pencatatannya, dan peraturan terkait dengan penyusunan laporan keuangan daerah untuk menunjang kualitas kinerjanya.

*British Broadcasting Corporation Indonesia* (2017) memberitakan adanya kasus dugaan suap terkait pemberian opini WTP terhadap anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan empat tersangka, yaitu Inspektur Jenderal

dan pejabat eselon III Kemendes PDPT, serta pejabat eselon I dan auditor BPK. Ini merupakan salah satu contoh kasus yang menunjukkan bahwa sesungguhnya kinerja instansi pemerintah masih perlu banyak perbaikan, karena opini audit dengan predikat WTP tersebut ternyata merupakan kesepakatan rekayasa antara pihak yang diperiksa dengan pihak yang memeriksa.

Undang-Undang No. 29 tahun 2014 memberikan tuntutan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa untuk mengukur kinerja instansi pemerintahan dilakukan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam periode tertentu. Dalam laporan tersebut memuat tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja. Laporan Keuangan merujuk pada dipatuhinya ketentuan Sistem Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan dalam Laporan Kinerja merujuk pada ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Terkait dengan aturan tersebut di atas, bahwa hal-hal penting yang menjadi perhatian untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah dari sisi keuangan adalah, SKPD di instansi pemerintah harus memahami mendalam ketentuan tentang Standard Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi yang berlaku, serta tunduk dan patuh pada kedua standar tersebut. Untuk kedua hal tersebut sebenarnya merupakan dasar yang menentukan berkualitas atau tidaknya laporan keuangan yang akan dihasilkan, yang berujung pada penentuan kualitas kinerja instansi pemerintah tersebut nantinya.

Bagi instansi pemerintah, pencatatan atas transaksi keuangan merujuk pada ketentuan dan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menegaskan bahwa “Standar Akuntansi



Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Artinya bahwa setiap SKPD yang terlibat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan harus berpedoman pada prinsip-prinsip akuntansi yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Dari aspek lain, bahwa sistem informasi akuntansi yang di dalam instansi pemerintah diartikan sebagai sistem akuntansi pemerintah yang merupakan faktor pendukung kualitas laporan keuangan instansi pemerintah. Sistem informasi akuntansi sebagai media yang menghasilkan laporan keuangan, dalam operasionalisasinya harus didukung pula oleh SDM/SKPD yang berkompeten di bidang sistem akuntansi tersebut. Hal ini selaras dengan pernyataan Pasal 1 Ayat 11 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 sebagai berikut : “Sistem akuntansi pemerintahan adalah sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Mengacu kepada Pasal 1 Ayat 11 PP No.71 Tahun 2010 tersebut di atas, bahwa dalam menjalankan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di instansi pemerintahan, maka hal yang paling dominan terkait dengan pembahasan penelitian ini adalah kualitas penyelenggara dan peralatan pendukung terciptanya laporan keuangan (laporan pertanggungjawaban) yang berkualitas, standar peraturan yang tersedia, dan kepatuhan terhadap ketentuan tersebut.

Kualitas penyelenggara (dalam hal ini SKPD yang terlibat dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan), peralatan pendukung (dalam hal ini teknologi sistem informasi akuntansi pemerintahan), peraturan yang tersedia

(dalam hal ini Standar Akuntansi Pemerintah dan peraturan lainnya ), kepatuhan (mengikuti ketentuan, standar, SOP, dan kebijakan lainnya) yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang mendukung dan melengkapi keberhasilan instansi pemerintah mewujudkan kinerja instansinya

Elemen sistem informasi akuntansi pemerintah selain SDM/SKPD, maka perangkat pendukung menjadi hal yang menjadi prioritas untuk dilengkapi. Mengingat bahwa pada era digital saat ini, dimana setiap aktivitas akan semakin efektif dan efisien dengan dukungan teknologi digital. Hal ini yang mendasari keputusan pelaksanaan sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis teknologi. Itu artinya pencatatan akuntansi, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan sudah tidak lagi dilakukan secara manual oleh SDM, tetapi sudah terkomputerisasi yang dikendalikan/dioperasikan oleh SDM/SKPD.

Walaupun SDM pada posisi operator sistem informasi akuntansi pemerintah berbasis teknologi tersebut, namun sesungguhnya dia yang pada akhirnya menentukan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan demikian sesungguhnya kinerja keuangan melalui laporan keuangan, dan laporan kinerja melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terletak pada kompetensi SKPD yang bersentuhan langsung dengan semua tugas tersebut.

Merujuk pada fenomena kasus hasil audit anggaran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang mendapat opini audit WTP yang dilatarbelakangi oleh unsur penyuapan di dalamnya, ini membuktikan bahwa dalam pengelolaan keuangan/anggaran di kementerian tersebut terdapat penyimpangan/pelanggaran ketentuan yang berlaku

yang dapat menurunkan (berpengaruh) terhadap kualitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

Permasalahan yang mendasar dan menjadi masalah umum instansi pemerintah saat ini yaitu adanya pemikiran aparatur pemerintah bahwa ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya hanya bertumpu pada kemampuan instansi dalam menyerap anggaran yang dialokasikan, yakni keberhasilan instansi hanya ditekankan pada aspek *input* tanpa melihat tingkat *output* maupun dampaknya yang kemungkinan masih jauh dari standar (BPKP, 2000). Padahal untuk dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah, seluruh aktivitas organisasi harus dapat diukur dan indikator pengukuran tidak hanya berdasarkan pada *input* tetapi juga berdasarkan kepada keluaran atau manfaat dari suatu program/kegiatan. Instansi pemerintah cenderung menyusun dan menyampaikan laporan kinerja instansi pemerintah hanya sekedar memenuhi formalitas tanpa memenuhi kualitas kinerja yang sesungguhnya dihasilkan.

Hasil observasi di instansi pemerintah Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai diperoleh berbagai informasi terkait dengan kualitas kinerja instansi, kualitas aparatur kecamatan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencapaian kualitas kinerja instansi tersebut. Hasil kinerja instansi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk tahun 2017-2019 sebagai berikut :

Tabel 1.1: Realisasi Kinerja Kantor Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Tahun 2017-2019

Keterangan	Tahun		
	2017	2018	2019
Pencapaian Target Kinerja	97,93%	82,83%	83,36%
Belum Mencapai Target	2,07%	17,17%	16,64%
Total	100%	100%	100%

Sumber : LAKIP Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai

Pencapaian kinerja Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai selama 3 tahun menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Tahun 2018 mengalami penurunan pencapaian kinerja, dan tahun 2019 mengalami kenaikan kinerja. Dari sisi target kinerja yang belum tercapai untuk 2 tahun terakhir (2018 dan 2019) berada di atas 10%. Kondisi ini lebih buruk dari tahun 2017 yang hanya sebesar 2,07% target kinerja yang belum tercapai.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis ingin mengetahui lebih dalam tentang Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah dan pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai”.

## **1.2. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

### **1.2.1. Identifikasi Masalah**

Mengacu kepada uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka identifikasi masalah yang dapat dikemukakan adalah : Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai memiliki keterbatasan SDM baik dari sisi kuantitas (kompetensi) maupun kualitas (jumlah), yang berdampak pada pencapaian kinerja instansi tersebut.

### **1.2.2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi hanya pada pembahasan hal-hal yang berhubungan dengan pengaruh Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Beberapa rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ?
2. Apakah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ?
3. Apakah Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai ?

### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah untuk :

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa pengaruh secara parsial Sistem Informasi Akuntansi terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa pengaruh secara parsial Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

3. Mengetahui, memahami dan menganalisa pengaruh secara simultan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian.**

Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dari sisi :

1. Aspek teoritis (keilmuan)

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam teori penggunaan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mendorong peningkatan kinerja instansi pemerintah.

2. Aspek praktis (kegunaan)

- a. Bagi Instansi Pemerintah

Bagi Instansi pemerintah, khususnya Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dapat menjadi masukan dan perbaikan dalam meningkatkan kinerja pada instansi tersebut.

- b. Bagi pihak kampus (akademik)

Dapat menjadi referensi dan pembanding untuk penelitian yang sejenis di waktu yang akan datang.

#### **1.5. Keaslian Penelitian.**

Penelitian ini mengambil perbandingan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fatmala (2014) dari Universitas Bengkulu. Penelitian tersebut yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah“. Terdapat beberapa perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan ini, diantaranya :

1. Penelitian terdahulu mengambil lokasi di Bengkulu dengan objek penelitian SKPD Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sedangkan objek penelitian ini adalah Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara.
2. Penelitian terdahulu mengambil sampel sebanyak 38, sedangkan penelitian ini mengambil sampel sebanyak 20 sampel.
3. Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2014, sedangkan penelitian ini dilakukan di tahun 2020.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kinerja Instansi Pemerintah**

###### **2.1.1.1. Pengertian Kinerja**

Keberhasilan sebuah entitas baik itu entitas pemerintahan maupun entitas diukur dengan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode tertentu. Pengukuran kinerja tersebut dapat dilakukan dari berbagai aspek, tergantung dari penilai melakukannya. Namun pada dasarnya penilaian kinerja dapat dilakukan dari aspek keuangan, non keuangan, atau kombinasi keduanya yang dikenal dengan *metode balanced scorecard*.

Pada dasarnya pengertian kinerja yang dikemukakan oleh Simanjuntak dalam Widodo (2015:131) “Kinerja adalah tingkatan pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu”. Sedangkan Torang (2013:74) menyatakan “Kinerja adalah hasil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berpedoman pada norma, standar operasional prosedur, kriteria dan ukuran yang telah ditetapkan atau yang berlaku dalam organisasi”. Sedangkan menurut Undang-Undang No.29 tahun 2014 menyatakan “Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur”.

Berdasarkan beberapa pengertian kinerja tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja pokok (utama) yang telah



dicapai oleh organisasi/instansi secara kualitas maupun kuantitas dengan berpedoman pada ketentuan kerja yang berlaku.

Kinerja yang telah dihasilkan dan diukur tersebut, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan/kegagalan organisasi/instansi dalam periode tertentu. Dapat pula dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan/rencana kerja pada periode yang akan datang. Atau dapat pula dijadikan motivasi bagi pengelola organisasi/instansi untuk memajukan dan mengembangkan aktivitas usaha untuk menghasilkan kinerja yang lebih meningkat.

Dalam upaya mencapai tingkat kinerja yang maksimal, beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja instansi/organisasi diantaranya (Mangkunegara, 2016:25) :

a. Faktor *Kuantitatif* meliputi :

1. Proses kerja dan kondisi kerja
2. Waktu yang diperlukan
3. Jumlah kesalahan/penyimpangan
4. Pelayanan/supporting dalam bekerja

b. Faktor *Kualitatif* meliputi :

1. Ketepatan/akurasi kerja
2. Tingkat kemampuan pelaksana
3. Kemampuan menganalisa data dan informasi, kemampuan/kegagalan menggunakan fasilitas/perangkat
4. Kemampuan mengevaluasi (keluhan/keberatan masyarakat)

Faktor pendukung kinerja instansi/organisasi sangat perlu dipertimbangkan, karena kegagalan pencapaian kinerja banyak disebabkan oleh

manajemen yang kurang peduli terhadap faktor-faktor tersebut, sehingga pada saat kegagalan pencapaian kinerja organisasi, kesalahan selalu dilimpahkan pada karyawan yang dianggap tidak/kurang maksimal dalam bekerja.

#### **2.1.1.2. Kinerja Instansi Pemerintah**

Kinerja instansi pemerintah yang baik mencerminkan kondisi dan kualitas instansi tersebut yang akan membawanya menjadi instansi yang *Good Governance* (tata kelola instansi yang sehat). Predikat tersebut merupakan yang predikat yang dituntut oleh pemangku kepentingan di Indonesia, agar seluruh instansi pemerintah di Indonesia menjadi instansi yang sehat.

Pada dasarnya definisi kinerja instansi pemerintah menurut Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 adalah “Gambaran mengenai tingkat pencapaiansasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansipemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dankebijakan yang ditetapkan. Sejalan dengan itu Undang-Undang No.29 tahun 2014 menyatakan bahwa “Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik”.

Berdasarkan pengertian kinerja instansi pemerintah tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban

mempertanggungjawabkan hasil kerja instansi tersebut, baik berhasil maupun gagal. Pertanggungjawaban yang dimaksud merupakan hasil pengelolaan/penggunaan keuangan daerah, pencapaian kegiatan dan program kerja yang telah disusun dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

Sebagai bentuk perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap pemangku kepentingan, maka setiap instansi pemerintah secara periodik menyampaikan hasil kerjanya (kinerja). Dengan laporan kinerja tersebut akan terlihat keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam mengemban amanah yang diberikan kepada instansi pemerintah tersebut.

#### **2.1.1.3. Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah**

Tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dapat dilihat dari konsistensi instansi pemerintah tersebut mewujudkannya melalui sasaran, tujuan, misi dan visi instansi pemerintah. Kesemuanya itu dirumuskan dalam skema strategis (*strategic planning*) instansi pemerintah tersebut. Skema strategis menjadi alat ukur yang memudahkan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan seluruh kegiatan/program kerjanya.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah atas seluruh amanat yang diberikan kepadanya, bertujuan untuk memperoleh hasil kinerja yang nyata dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan umpan balik, sehingga upaya perbaikan secara terus-menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai pertanggungjawaban instansi pemerintah dan SKPD dalam menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan daerah yang lebih baik. Sistem pengukuran

kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk membantu SKPD menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja yang baik, seharusnya diperkuat dengan menetapkan penghargaan dan hukuman, sehingga penilaian yang dilakukan oleh pemangku kepentingan mengedepankan keadilan dalam sistem penilaian kinerja instansi pemerintah.

Mengutip pernyataan BPKP dan LAN dalam Yusrianti (2015:548) bahwa tujuan penilaian pengukuran kinerja instansi pemerintah adalah :

1. Untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down* dan *bottom up*).
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi.
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*.
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Sedangkan fungsi dari evaluasi atau penilaian kinerja diantaranya;

1. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja instansi pemerintah
2. Untuk memberikan masukan dalam mengatasi masalah yang ada.

Penilaian kinerja instansi pemerintah dilakukan dari hasil laporan yang dibuat dan dilaporkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders). Laporan kinerja instansi pemerintah merujuk pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan kinerja instansi pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tuntutan kepada setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan penilaian kinerja instansi pemerintah adalah bahwa setiap instansi pemerintah secara berkala wajib mengomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran instansi kepada para stakeholders, yang dituangkan melalui laporan kerjanya dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan laporan kinerja ini dilakukan melalui proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana kinerja, serta pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

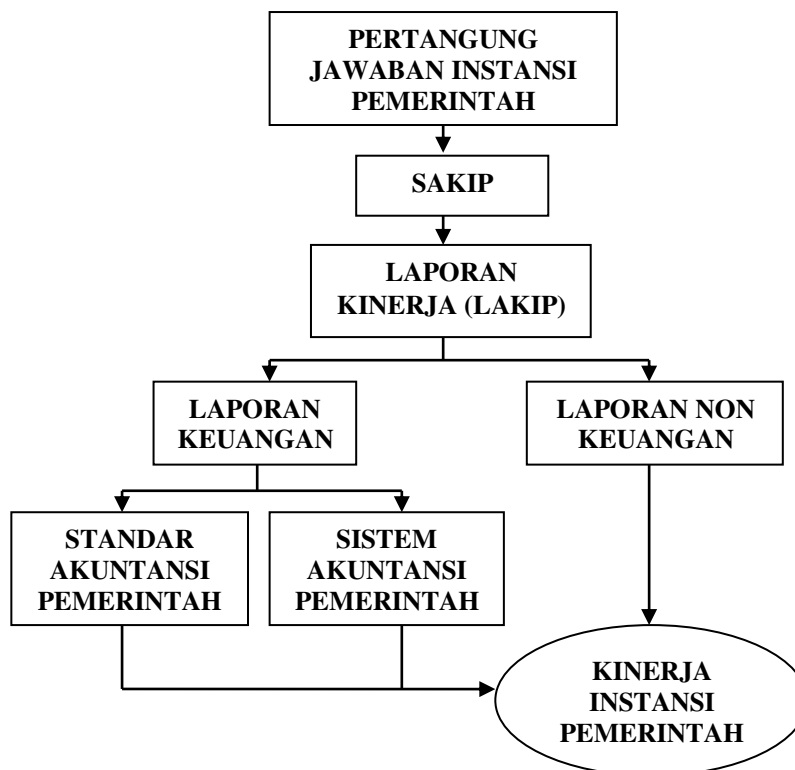
LAKIP adalah media akuntabilitas yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban menjawab pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholders). Media akuntabilitas yang dibuat secara periodek tersebut memuat informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang memberi amanah atau memberikan delegasi kewenangan. Ruang lingkup laporan kinerja dengan LAKIP. Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang meliputi :

- a. Evaluasi atas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. pencapaian kinerja organisasi
- c. Menyusun pemeringkatan hasil evaluasi LAKIP SKPD

#### 2.1.1.4. Indikator Penilaian Kinerja Instansi Pemerintah

Penilaian kinerja instansi pemerintah dilakukan secara berkala oleh pihak-pihak yang ditunjuk dalam hal ini BPKP. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh instansi pemerintah tersebut dalam satu periode akuntansi. Unsur-unsur penilaian merujuk pada ketentuan pemeriksaan yang berlaku di pemerintahan, dimana hal yang utama dilakukan adalah melihat penyimpangan yang terjadi baik dari visi, misi, rencana kerja, kepatuhan dan sebagainya yang kesemuanya itu dapat dilihat dari laporan kinerja instansi pemerintah dan laporan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang No.29 tahun 2014, dapat ditarik kesimpulan tentang tahapan sumber penilaian kinerja instansi pemerintah yang diilustrasikan sebagai berikut :



Sumber : UU No.29 Tahun 2014

Gambar 2.1: Kinerja Instansi Pemerintah

Penjelasan atas ilustrasi tersebut di atas, bahwa penilaian kinerja instansi pemerintah dilihat dari pertanggungjawaban instansi amanat yang diberikan kepadanya. Kualitas pertanggungjawaban tersebut dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan, apakah telah memenuhi ketentuan yang berlaku berdasarkan standar akuntansi pemerintah, dan penggunaan sistem akuntansi telah menjaga kualitas input, proses dan output yang merujuk pada SOP dan standar akuntansi yang berlaku. Kualitas pertanggungjawaban dilihat dari kualitas laporan kinerja. Dalam laporan kinerja yang disusun berdasarkan SAKIP apakah telah menggambarkan dengan jelas penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari sisi keuangan melalui laporan keuangan, maka merujuk pada Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 instansi pemerintah harus memuat laporan keuangan yang terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran
- c. Neraca
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Arus Kas
- f. Laporan Perubahan ekuitas
- g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi, sehingga dapat

memenuhi tujuannya. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut meliputi :

1. Relevan.

Informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, disajikan tepat waktu, dan lengkap.

2. Andal

Informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi, dan netral

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan

4. Dapat dipahami

Informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh pengguna.

Mempertanggung jawabkan kinerja instansi pemerintah dari sisi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka karakteristik yang harus terpenuhi merujuk pada ketetapan Kepala LAN No.239/IX/6/8/2003 sebagai berikut :

a. Komitmen

Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh SKPD instansi yang bersangkutan.

b. Taat pada ketentuan/peraturan

Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pencapaian

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



d. Hasil dan manfaat

Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh.

e. Jujur, objektif, transparan, akurat

f. Realistis

Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **2.1.2. Sistem Informasi Akuntansi**

#### **2.1.2.1. Pengertian Sistem Informasi Akuntansi**

Perkembangan teknologi di bidang informasi yang sudah tidak lagi mampu dihalangi, terutama penggunaannya di sektor bisnis, termasuk dalam mengelola transaksi dan catatan keuangan serta pelaporannya. Dalam hal pencatatan transaksi akuntansi, proses transaksi akuntansi, serta aktivitas pembentukan laporan keuangan, maka mengadopsi teknologi merupakan sebuah pilihan yang tepat.

Sehubungan dengan pengelolaan transaksi keuangan dan pelaporan keuangan tersebut, maka teknologi menjadi hal yang penting untuk mendukung terciptanya sistem informasi akuntansi yang berkualitas, cepat, tepat dan akurat serta efektif dan efisien. Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi khususnya teknologi komputer menjadi begitu penting dihadirkan dalam kegiatan bisnis, karena menawarkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola transaksi data keuangan/akuntansi.

Pada dasarnya sistem informasi akuntansi merupakan sebuah sistem yang mengelola data keuangan menjadi laporan keuangan. Romney dan Steinbart

(2016:11) menjelaskan “Sistem informasi akuntansi mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses akuntansi dan data-data lain untuk menghasilkan informasi bagi pembuat keputusan”. Definisi lainnya, Diana (2017:04) menyatakan “Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang bertujuan untuk mengumpulkan dan memproses data serta melaporkan informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan”. Mulyadi (2016:3) menjelaskan bahwa “Sistem informasi akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang di koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan”.

Dalam konteks sektor publik atau pemerintahan, PP No. 71 tahun 2010 menyebutkan bahwa “Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah”.

Beberapa definisi di atas memberikan informasi bahwa untuk mendapatkan laporan keuangan, memerlukan proses data keuangan melalui sistem informasi akuntansi. Pengolahan data akuntansi yang banyak dengan berbagai jenis transaksi, untuk menghasilkan informasi akuntansi yang diperlukan oleh pihak-pihak lain untuk kebutuhan perusahaan.

Romney (2016:11-12) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat membantu perusahaan dalam hal :

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk dan jasa
2. Meningkatkan efisiensi efektivitas
3. Berbagi pengetahuan.

4. Meningkatkan struktur pengendalian internal.
5. Meningkatkan/memudahkan pengambilan keputusan.

Diana (2017:5-7) memberikan penjelasan bahwa sistem informasi akuntansi bertujuan untuk :

1. Mengamankan harta/kekayaan perusahaan.
2. Menghasilkan beragam informasi untuk pengambilan keputusan
3. Menghasilkan informasi untuk pihak eksternal.
4. Menghasilkan informasi untuk penilaian kinerja karyawan atau divisi.
5. Menyediakan data masa lalu untuk kepentingan audit
6. Menghasilkan informasi untuk penyusunan dan evaluasi anggaran perusahaan.
7. Menghasilkan informasi yang diperlukan dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

Mulyadi (2016:15) memberikan penjelasan bahwa tujuan dari sistem informasi akuntansi adalah :

1. Menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha
2. Memperbaiki informasi yang dihasilkan dari sistem yang sudah ada
3. Memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern.
4. Mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Sistem Informasi Akuntansi berbasis teknologi informasi yang merupakan sebuah sistem pengelolaan data akuntansi untuk menghasilkan laporan akuntansi yang didukung dengan peralatan /teknologi. Dalam hal pemilihan teknologi informasi sebagai pendukung sistem informasi akuntansi, mempertimbangkan berbagai tujuan penggunaannya, diantaranya : (Sutarman, 2012:17) :

1. Untuk memecahkan masalah
2. Untuk membuka kreativitas
3. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan

Sedangkan fungsi dari teknologi informasi itu sendiri menurut Sutarman (2012:18) adalah :

1. Menangkap

Mengkompilasikan catatan rinci dari aktivitas keuangan/akuntansi, misalnya menerima posting jurnal, dan sebagainya.

2. Mengolah

Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), perhitungan (kalkulasi), penggabungan segala bentuk data dan informasi.

3. Menghasilkan

Mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna, misalnya : laporan, tabel, grafik, dan sebagainya.

4. Menyimpan

Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam satu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

5. Mencari kembali

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin (*copy*) data dan informasi yang sudah tersimpan.

6. Transmisi

Mengirimkan data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan internet.

Begitu kompleksnya peran teknologi informasi membantu pencapaian tujuan sistem informasi akuntansi, sehingga mampu menyederhanakan pekerjaan akuntansi yang begitu panjang menjadi tahapan yang pendek dan sederhana. Kadir (2014:12) menjelaskan, bahwa peran teknologi informasi sebagai berikut :

1. Teknologi informasi menggantikan peran manusia. Dalam hal ini teknologi informasi melakukan otomatisasi terhadap suatu tugas atau proses
2. Teknologi informasi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restruktur terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses.

#### **2.1.2.2. Kriteria Kualitas Sistem Informasi Akuntansi**

Sistem Informasi Akuntansi merupakan sistem yang dibangun dengan berbagai unsur yang melengkapinya, dimana unsur-unsur tersebut saling terkoneksi dan melengkapi satu dengan lainnya. Koneksi dari masing-masing unsur tersebut akan menghasilkan sebuah sistem informasi akuntansi yang menghasilkan *output* yang berkualitas, jika masing-masing unsur berjalan sesuai dengan fungsinya. Karena pada dasarnya rancangan sistem informasi akuntansi memiliki tujuan khusus bagi perusahaan/lembaga yang menggunakannya.

Krismiaji (2010:188) merumuskan bahwa sesungguhnya tujuan dari dibangunnya sistem informasi akuntansi adalah “Agar sistem tersebut memenuhi tujuan dari sisi kemanfaatan, ekonomis, daya andal, ketersediaan, service pelanggan, kapasitas, praktis, fleksibel, daya telusur, daya audit dan keamanan”.

Romney (2016:11) menjelaskan, unsur atau komponen dalam sistem informasi akuntansi membutuhkan beberapa faktor, yang dapat menjadikan sistem informasi akuntansi tersebut menjadi lebih sempurna. Beberapa faktor pendukung yang dapat memfungsikan sistem informasi akuntansi menjadi lebih sempurna dalam penggunaannya, adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang menggunakan sistem
- b. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
- c. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
- d. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
- e. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi : komputer, perangkat perifer, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi.
- f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi.

Keseluruhan faktor tersebut di atas setidaknya harus memiliki kualitas memadai untuk mendukung kualitas sistem informasi akuntansi tersebut secara menyeluruh. Apabila satu diantara faktor tersebut tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, maka akibat buruk yang muncul adalah sistem informasi akuntansi akan terganggu. Akibat yang lebih buruk lagi kinerja perusahaan juga akan terganggu. Terutama dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Untuk mendapatkan kualitas sistem informasi akuntansi yang baik, dan memenuhi unsur efektivitas dalam operasionalnya, maka peran utama manusia sebagai *user* harus ditingkatkan kompetensinya. Prosedur dan ketentuan yang

berlaku sebagai pedoman operasional harus diyakini telah dipatuhi. Infrastruktur/teknologi informasi sebagai faktor mempercepat, menjaga keakuratan data akuntansi, harus dipastikan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pengguna. Pengendalian atau kontrol pelaksanaan penggunaan sistem informasi akuntansi berjalan maksimal dan profesional.

Efektivitas sistem informasi akuntansi terpenuhi, jika informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh pemakai/pengguna informasi terpenuhi dan sesuai harapan. Sedangkan efisiensi dari sistem informasi akuntansi berlaku apabila sistem informasi akuntansi tersebut membutuhkan waktu yang singkat untuk menghasilkan sebuah atau beberapa laporan akuntansi.

Menurut DeLone dan McLean dalam Wahyuni (2018:3) menjelaskan metode pengukuran efektivitas Sistem Informasi Akuntansi sebagai berikut :

1. *System quality* (kualitas sistem)

Kualitas sistem akuntansi diukur dalam hal kemudahan penggunaan, fungsionalitas, kehandalan, fleksibilitas, kualitas data, integrasi dan peran pentingnya dalam suatu organisasi.

2. *Information quality* (kualitas informasi)

Kualitas informasi diukur dalam hal akurasi, ketepatan waktu, kelengkapan, relevansi, dan konsistensi.

3. *Service quality* (kualitas pelayanan)

Kemampuan sistem informasi akuntansi dalam memenuhi kebutuhan penggunanya.

#### 4. *System Use* (Penggunaan sistem)

Penggunaan sistem diukur sebagai frekuensi penggunaan, waktu penggunaan, jumlah akses, dan ketergantungan.

#### 5. *User Satisfaction* (kepuasan pengguna)

Berkaitan dengan tingkat kepuasan pengguna sistem terhadap sistem dan *output* yang dihasilkan.

#### 6. *Net benefits* (manfaat bersih)

Berkaitan dengan keuntungan atas keberadaan dan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi.

Untuk mendeteksi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh lembaga sektor publik, maka hal-hal tersebut di atas dapat menjadi pedoman penilaiannya. Dengan memahami hal-hal tersebut di atas, maka akan memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut mengambil kesimpulan, keputusan, kebijakan, dan kepentingan lainnya.

#### **2.1.2.3. Peran Pengguna Sistem Informasi Akuntansi**

Peran para pengguna/pemakai sistem informasi akuntansi sangat memegang peranan penting atas keberhasilan sistem informasi akuntansi menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Susanto (2013:371) menjelaskan beberapa hal yang mendukung kualitas pemakai untuk mendukung keberhasilan penggunaan sistem informasi akuntansi, yaitu :

1. Mempromosikan komunikasi dua arah
2. Menyediakan jaringan kerja yang terintegrasi
3. Mengenali kemajuan pemakai
4. Memiliki kapabilitas yang dinamis



5. Mudah menangani keinginan pemakai
6. Mudah mengenali kebutuhan pemakai
7. Tersedianya sumber daya yang memadai seperti keuangan, waktu, usaha dan tenaga ahli.

Susanto (2013:368) juga menambahkan beberapa indikator pemakai sistem informasi akuntansi sebagai berikut :

1. Hubungan

Meningkatkan hubungan antar pemakai, manajemen dan ahli sistem informasi akuntansi

2. Wawasan

Memperluas wawasan pemakai dan manajemen dalam bidang komputer, di sisi lain juga memperluas wawasan bisnis dan aplikasinya bagi ahli sistem informasi

3. Tanggung jawab

Meringankan beban tanggung jawab pemakai dan manajemen bila terjadi konflik

4. Waktu

Kerjasama antar pemakai, manajemen dan ahli sistem informasi dapat mempersingkat waktu pengembangan sistem informasi akuntansi yang lebih terstruktur

5. Keinginan pemakai

Melalui penentuan keinginan pemakai yang lebih tepat dan penentuan prioritas utama, maka penggunaan jasa dengan ahli sistem informasi ini akan lebih menghemat biaya

## 6. Nilai, kepuasan dan dukungan

Kerjasama pemakai, manajemen dan tenaga ahli sistem informasi sering kali menghasilkan sistem informasi yang lebih bernilai dan memberikan kepuasan yang lebih baik bagi pemakai maupun pihak manajemen, sehingga meningkatkan kepercayaan dan dukungan pemakai dan manajemen terhadap proyek pengembangan sistem informasi yang dilakukan

## 7. Biaya

Mengurangi biaya pemeliharaan, karena sejak versi pertama dihasilkan, telah mampu memenuhi kebutuhan organisasi umumnya.

Robbin dalam Yesa (2016:11) menjelaskan bahwa kemampuan seorang pemakai sistem informasi akuntansi dapat dilihat melalui :

### 1. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan sebagai pemakai sistem informasi akuntansi dapat dilihat melalui

- a. Memiliki pengetahuan mengenai sistem informasi akuntansi
- b. Memahami pengetahuan tugas dari pekerjaannya sebagai pemakai sistem informasi akuntansi.

### 2. Kemampuan (*abilities*)

Kemampuan sebagai pemakai sistem informasi akuntansi dapat dilihat dari :

- a. Kemampuan menjalankan sistem informasi akuntansi yang ada
- b. Kemampuan untuk mengekspresikan informasi yang ada
- c. Kemampuan untuk mengekspresikan bagaimana sistem seharusnya
- d. Kemampuan mengerjakan tugas dari pekerjaan
- e. Kemampuan menyelaraskan pekerjaan dengan tugas.

### 3. Keahlian (*skill*)

Keahlian sebagai pemakai sistem informasi dapat dilihat dari :

- a. Keahlian dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Keahlian dalam mengekspresikan kebutuhan-kebutuhannya dalam pekerjaan

#### **2.1.3. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**

##### **2.1.3.1. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah**

Sistem akuntansi yang dirancang dan dijalankan secara baik, akan menjamin terwujudnya pertanggungjawaban keuangan yang baik pula. Pemerintah atau unit kerja pemerintahan perlu memiliki sistem akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem akuntansi tersebut dapat menjadi alat pencapaian tujuan pemerintah.

Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan baik untuk sektor swasta maupun sektor publik. Tidak tersedianya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya kualitas informasi keuangan yang disajikan, tidak konsisten dalam pelaporan keuangan, dan menyulitkan dalam pengauditan.

Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 menjelaskan bahwa “Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah”. Menurut Bastian (2010:137) “Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah Indonesia”.

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua kegiatan yang mencakup pengumpulan data, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi keuangan pemerintah sebagai sebuah entitas, serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya, (Mardiasmo, 2018:147). Semua aktivitas keuangan di lembaga pemerintahan seperti yang tersebut di atas, pada tahapan pencatatan hingga tahapan pelaporan keuangan merujuk dan berpedoman Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Semakin luas aktivitas keuangan yang dikelola, maka akan semakin kompleks permasalahan akuntansi yang ditemui. Dengan tersedianya SAP yang menjadi standar pengelolaan keuangan pemerintahan, maka akan lebih memudahkan menemukan solusi atas berbagai permasalahan keuangan tersebut.

SAP dijadikan rujukan pemasalahan akuntansi karena SAP mempertimbangkan beberapa hal (Mardiasmo, 2018:149) :

1. SAP memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan keuangan, kinerja dan aktivitas sebuah organisasi bagi seluruh pengguna informasi.
2. SAP memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya dalam mengaudit laporan suatu organisasi serta saat membuktikan kewajarannya.
3. SAP memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan yang berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang

perpajakan, regulasi, perencanaan serta regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya.

4. SAP menghasilkan prinsip-prinsip dan teori yang penting bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

#### **2.1.3.2. Tujuan dan Manfaat Standar Akuntansi Pemerintah**

Sebagai pedoman pengelolaan catatan transaksi keuangan pemerintah dan pedoman pelaporan keuangan pemerintah, SAP disusun untuk tujuan menjamin kualitas laporan keuangan yang disusun dan disajikan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola keuangan/dana masyarakat.

Standar Akuntansi sangat diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan. Tidak tersedianya standar akuntansi yang memadai akan menimbulkan rendahnya tingkat kualitas dan objektivitas informasi yang disajikan, tidak konsisten dalam pelaporan keuangan serta akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan audit.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan serta merupakan acuan bagi penyusunan standar, penyusunan laporan keuangan, pemeriksa, pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan standar akuntansi pemerintah (Siregar, 2015:73).

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan bertujuan :

1. Penyusunan standar akuntansi
2. Penanganan masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan

3. Pemberian opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
4. Penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintahan oleh para pengguna.

Fakhrurrazi (2010:15) menjelaskan, “Manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholder*”. Dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, pengendalian aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah.

Manfaat selanjutnya adalah keseimbangan, dimana dapat memberikan informasi kecukupan penerimaan pemerintah untuk membiayai seluruh pengeluaran. Laporan keuangan yang dihasilkan dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan sumber daya dalam mencapai tujuan.

Mahmudi (2011:271), manfaat dari ketersediaannya SAP adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan
2. Kriteria bagi auditor untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai standar akuntansi yang mengaturnya
3. Memudahkan memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan
4. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan
5. Menjadi acuan dalam penyusunan sistem akuntansi

Tersedianya SAP dalam mendukung aktivitas pengelolaan keuangan di lembaga sektor publik/pemerintahan, memberikan jaminan akan terciptanya

kinerja pelaporan akuntansi yang memadai dan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Itu berarti lembaga sektor publik telah menjawab tujuan dan manfaat dari SAP itu sendiri. Lebih dari pada itu, bahwa pemahaman yang mendalam terhadap SAP dan mengaplikasikan SAP dalam praktek akuntansi secara konsisten, akan lebih menjamin pencapaian tujuan pelaporan keuangan yang berkualitas.

### **2.1.3.3. Dimensi Standar Akuntansi Pemerintah**

Praktek akuntansi di sektor pemerintahan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berbasis akrual sesuai dengan PP No.71 tahun 2010. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, SAP yang digunakan adalah SAP berbasis kas. Perubahan terhadap SAP tersebut dilakukan untuk menjawab permasalahan akuntansi yang semakin berkembang di dalam praktek bisnis dan pemerintahan.

Siregar (2015:72) SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan LO (Laporan Operasional), beban aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan LRA (Laporan Realisasi Anggaran), belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam anggaran negara/daerah”.

Susunan SAP berbasis akrual ini menguraikan dan menjelaskan pedoman perlakuan akuntansi untuk lembaga sektor publik. Rincian tahapan tersebut dijelaskan dalam PP No. 71 tahun 2010 terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 pedoman akuntansi adalah sebagai berikut :

1. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.
2. PSAP 1. Penyajian Laporan Keuangan

3. PSAP 2. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas
4. PSAP 3. Laporan Arus Kas
5. PSAP 4. Catatan atas Laporan Keuangan
6. PSAP 5. Akuntansi Persediaan
7. PSAP 6. Akuntansi Investasi
8. PSAP 7. Akuntansi Aset Tetap
9. PSAP 8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan
10. PSAP 9. Akuntansi Kewajiban
11. PSAP 10. Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi,
12. PSAP 11. Laporan Keuangan Konsolidasian
13. PSAP 12. Laporan Operasional

## 2.2. Penelitian Sebelumnya

Untuk lebih memudahkan penelitian ini, penulis mengambil beberapa penelitian sebelumnya sebagai perbandingan dan sebagai pedoman. Penelitian yang dijadikan pembanding adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.  
Penelitian Sebelumnya

Peneliti / Tahun	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
Fatmala (2014)	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Sistem Akuntansi Pemerintah (X1) Pemahaman Akuntansi (X2) Ketaatan Perundangan (X3)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Uji-t Uji-F Regresi Linier	Sistem Akuntansi Pemerintah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Perundangan secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah



Nasution (2019)	Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)  Pengawasan Laporan Keuangan (X2)	Kinerja Instansi Pemerintah	Uji-t Uji-F Regresi Linier	Standar Akuntansi Pemerintah dan Pengawasan Laporan Keuangan berpengaruh parsial dan simultan terhadap kinerja instansi pemerintah
Ihsan Taufik (2018)	Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	Kualitas Sistem Informasi Akuntansi (X1)  Sistem Pengendalian Internal (X2)  Komitmen Organisasi (X3)	Kinerja Instansi Pemerintah	Uji-t Uji-F Regresi Linier	Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, dan Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah parsial dan simultan
Tamalea dan Audimy (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan, dan Motivasi Kerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Standar Akuntansi Pemerintah (X1)  Sistem Pelaporan (X2)  Motivasi Kerja (X3)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Uji-t Uji-F Regresi Linier	Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pelaporan dan Motivasi Kerja berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

Sumber : Data diolah dari webside

### 2.3. Kerangka Konseptual

Laporan kinerja sektor publik atau instansi pemerintah yang berkualitas merupakan hasil dari tahapan-tahapan kerja yang meliputi pertanggungjawaban pengelolaan APBD, kepatuhan terhadap ketentuan dan prosedur, pencapaian visi dan misi instansi pemerintah, penyusunan dan penyajian laporan keuangan, serta

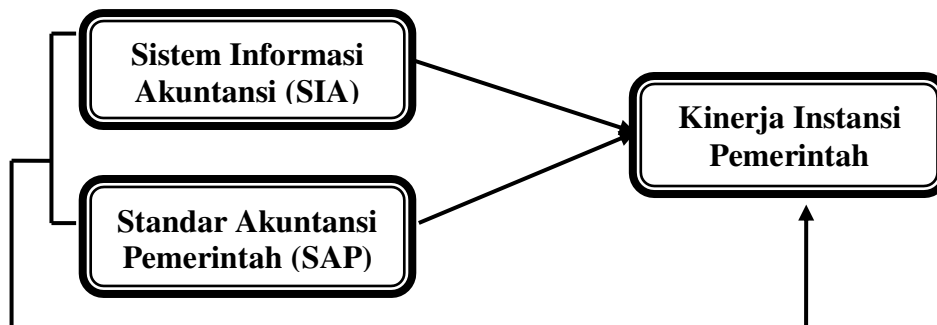
penyusunan dan penyajian laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Apabila pelaksana tugas (SKPD) menjalankan seluruh input, proses dan output dengan baik dan mengikuti standar ketentuan yang berlaku, maka sangat dimungkinkan akan menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang baik, dan sebaliknya. Fokus dari kualitas laporan keuangan adalah faktor pendukung yang mampu mendorong laporan keuangan dan laporan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas. Dari sektor pertanggung jawaban keuangan, maka Sistem informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah merupakan dua hal yang dapat dijadikan pendorong penilaian kualitas laporan keuangan instansi pemerintah tersebut.

Sistem informasi akuntansi yang baik, harus dijalankan oleh manusia yang paham dengan sistem tersebut, paham dengan *basic* akuntansi, dan paham dengan prosedur pembukuan yang berlaku (dalam hal ini, paham dengan Standar Akuntansi Pemerintah). Dan yang tak boleh diabaikan juga bahwa kualitas perangkat sistem informasi akuntansi juga menjadi prioritas. Menjadi sangat penting untuk dipahami oleh seluruh SKPD dalam mempertanggungjawabkan penggunaan APBD ialah, seluruh SKPD harus memahami Standar Akuntansi Pemerintah, karena ini merupakan pedoman mutlak bagi SKPD yang bertugas menyusun dan menyajikan laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam bentuk laporan keuangan.

Pengaruh penggunaan sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah telah dibuktikan oleh beberapa peneliti. Taufik (2018) dan Fatmala (2014) membuktikan bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Tammalea (2017) dan Nasution (2019) juga

membuktikan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka disusun sebuah kerangka pembahasan skripsi yang diwujudkan dalam kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 2.2 : Kerangka Konseptual

#### 2.4. Hipotesis

Untuk memberikan kemudahan dan mengarahkan penulis untuk menemukan kesimpulan, maka penulis menyusun beberapa hipotesis atas penelitian ini. Dengan hipotesis tersebut penulis berharap dapat menemukan jawaban/kesimpulan yang tepat atas penelitian ini.

Menurut Rusiadi, et al (2014:74) “hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya”. Maka berdasarkan definisi tersebut, penulis mencoba merumuskan beberapa dugaan atas hasil penelitian ini yang penulis kemukakan dalam hipotesis sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

2. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.
3. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif, yaitu metode penelitian yang melihat hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Pendekatan tersebut sesuai dengan yang didefinisikan oleh Rusiadi et al (2014:184) bahwa “penelitian kuantitatif asosiatif merupakan penelitian yang analisis datanya menggunakan statistik inferensial, dengan tujuan mengetahui derajat hubungan dan bentuk pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat”.

#### 3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kotamadya Tanjung Balai. Objek penelitian beralamat di Jl. Jendral Sudirman Km. 4,5 Tanjung Balai. Dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Januari 2020 dan direncanakan selesai Oktober 2020. Skedul Proses Penelitian dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1. Skedul Proses Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Jan s/d Sep 20	Okt.20	Nop.20	Des.20
1	Riset Awal/Pengajuan Judul	■			
2	Penyusunan Proposal		■	■	
3	Seminar Proposal			■	
4	Perbaikan/Acc Proposal			■	
5	Pengolahan Data			■	■
6	Penyusunan Skripsi			■	■
7	Bimbingan Skripsi				■
8	Sidang Meja Hijau				■

Sumber : Penulis Tahun 2020

### 3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Rusiadi, et al (2014:88) “definisi operasional adalah penjelasan tentang batasan atau ruang lingkup batasan penelitian, sehingga memudahkan pengukuran dan pengamatan serta pengembangan instrumen/alat ukur”. Batasan ruang lingkup variabel yang diteliti terdiri variabel sistem Sistem Informasi Akuntansi (X1) dan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) dan variabel terikat Kinerja Instansi Pemerintah (Y). Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala Likert, yang memberikan standar Sangat Setuju (5), Setuju (4), Ragu (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

Berikut ini ditampilkan tabel Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.  
Operasionalisasi dan Skala Pengukuran Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Sistem Informasi Akuntansi (X1)	1. Pengguna 2. Prosedur & instruksi 3. Memahami aktivitas 4. Perangkat lunak 5. Keamanan (Romney, 2016)	Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintahan. (PP No.21 Tahun 2010)	Likert
Standar Akuntansi Pemerintah (X2)	1. Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan 2. Standar Yang Mengatur 3. Memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahan 4. Menghasilkan kualitas 5. Acuan Sistem Akuntansi (Mahmudi, 2011)	Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. (PP. No, 21. Tahun 2010)	Likert
Kinerja Instansi Pemerintah	1. Laporan Keuangan 2. Akuntabilitas Kinerja Instansi	Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah	Likert

(Y)	Pemerintah (PP.No.29 tahun 2014)	sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. (Ketetapan Ketua LAN No.239/IX/6/8/2003)	
-----	-------------------------------------	--	--

Sumber : Berbagai Sumber Tahun 2020 (data diolah)

### **3.4. Populasi dan Sampel**

#### **3.4.1. Populasi**

Populasi menurut Rusiadi, et al (2014:30) “Adalah wilayah generalisasi atau seluruh objek/subjek penelitian”. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh SKPD Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang berjumlah 20 orang.

#### **3.4.2. Sampel**

Sampel menurut Rusiadi, et al (2014:31) “Adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan sampel jenuh. Artinya seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara :

#### **1. Observasi**

Melakukan pengamatan pada objek yang diteliti, untuk mendapatkan data yang diperlukan.

#### **2. Wawancara**

Melakukan tanya jawab dengan pegawai pada objek penelitian, untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang materi penelitian.

### 3. Kuesioner

Memberi dan menyebarkan daftar kuesioner kepada sampel penelitian, untuk mendapatkan data primer.

### 4. Kepustakaan

Menemukan data sekunder dan data pendukung lainnya seperti menemukan teori-teori tentang materi penelitian, data perbandingan (jurnal/skripsi terdahulu) dan bahan bacaan lainnya, termasuk bahan bacaan dari internet.

## 3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS (*Statistical Package for Social Science*). Analisis data dilakukan dengan berbagai metode :

### 3.6.1. Uji Kualitas Data

#### 3.6.1.1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya pernyataan dalam kuesioner.

#### 3.6.1.2. Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur stabilitas dan konsistensi sampel/responden menjawab kuesioner. Pertanyaan dikatakan reliabel (lolos uji) apabila menghasilkan nilai reliabel  $> Cronbach\ Apha\ 0,60$ .

### 3.6.2. Uji Asumsi Klasik

#### 3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah distribusi/penyebaran data telah tersebar secara normal. Uji normalitas yang baik bila data telah tersebar



secara merata dan normal. Uji normalitas dapat dideteksi dengan grafik histogram, normal probability plot, atau menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*.

### 3.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi korelasi regresi jawaban kuesioner variabel bebas dengan variabel terikat. Model yang baik, tidak terjadi korelasi regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat.

### 3.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi apakah data bersifat heteroskedastisitas, maka dilihat dari grafik *scatter-plot*. Model yang baik adalah jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, atau menyempit.

### 3.6.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda digunakan untuk menguji hubungan/korelasi/pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Model atau rumus yang digunakan untuk menganalisis dengan Regresi Linier Berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Penjelasan :

Y = Kinerja Instansi Pemerintah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel  $X_1$

$\beta_2$  = Koefisien regresi variabel  $X_2$

$X_1$  = Variabel Sistem Informasi Akuntansi

$X_2$  = Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

$e$  = Error of term

### **3.6.4. Uji Hipotesis**

#### **3.6.4.1. Uji Parsial (Uji-t)**

Untuk menjawab hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial (individu). Jika probabilitas  $< 0,05$  dan  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat (hipotesis diterima). Jika probabilitas  $> 0,05$  dan  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (hipotesis ditolak)

#### **3.6.4.2. Uji Simultan (Uji-F)**

Untuk menjawab hipotesis pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersama (simultan). Jika probabilitas  $< 0,05$  dan  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$  maka variabel bebas bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (hipotesis diterima). Jika probabilitas  $> 0,05$  dan  $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$  maka variabel bebas bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel terikat (hipotesis ditolak).

### **3.6.5. Uji Determinasi**

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen). Nilai koefisien determinasi antara 0 dan 1, yang berarti kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat amat terbatas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1. Profil Objek Penelitian**

Kecamatan Datuk Bandar merupakan satu dari 6 kecamatan yang berada di wilayah pemerintahan Kota Tanjung Balai. Kecamatan Datur Bandar berdiri berdasarkan Perda Kota Tanjung Balai No. 4 Tahun 2005. Kecamatan Datuk Bandar memiliki luas 2.249 Ha merupakan wilayah terluas diantara seluruh kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai. Jumlah penduduk Kecamatan Datuk Bandar berjumlah 33.758 jiwa, dengan kepadatan 1.501 jiwa/km, dan ini merupakan kepadatan penduduk yang paling rendah di seluruh wilayah Kota Tanjung Balai.

Kecamatan Datuk Bandar terhitung sejak Januari 2007 membawahi 5 kelurahan yang terdiri dari :

1. Kelurahan Sijambi
2. Kelurahan Pahang
3. Kelurahan Gading
4. Kelurahan Sirantau

Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung terletak di antara beberapa kecamatan. Batasan wilayah Kecamatan Datuk Bandar adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Joman dan Kecamatan Sei Tualang Raso.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Datuk Bandar Timut dan Kecamatan Tanjung Balai Selatan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan.

Pemerintahan Kecamatan Datuk Bandar memiliki visi dan misi menjalankan pemerintahan dan melayani masyarakatnya. Visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut :

Visi :

“Mewujudkan Kecamatan Datuk Bandar Bersih, Santun, Unggul dan Tuntas”

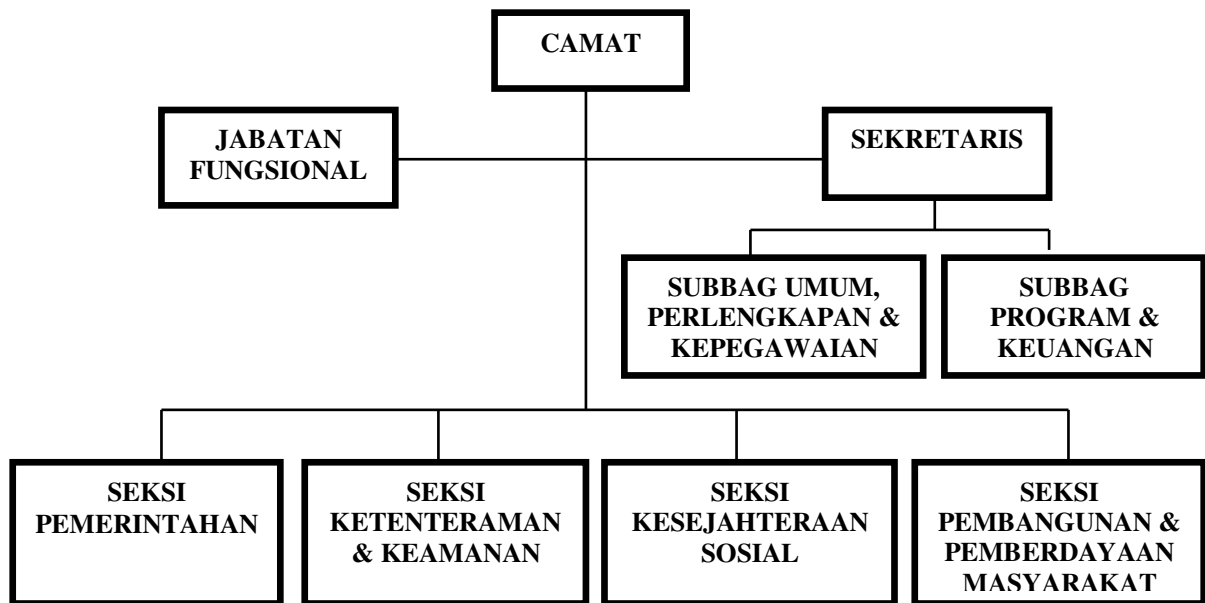
Misi :

1. Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif, dan tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
2. Membangun tata kelola keuangan yang efektif, bersih dan transparan.
3. Membangun sinergitas pemberdayaan masyarakat dalam tata kelola lingkungan yang bersih, nyaman, sehat dan tertib.
4. Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal.

#### **4.1.2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Kantor Kecamatan Datuk Bandar disusun untuk menunjang kelancaran organisasi pemerintahan kecamatan tersebut. Struktur Organisasi tersebut menggambarkan dan mengatur alur kerja, perintah dan pertanggungjawaban di Kantor Pemerintahan Kecamatan. Dengan struktur organisasi tersebut, akan menjadi jelas alur kerja, alur pertanggung jawaban, alur koordinasi kerja, dan alur perintah untuk menghindari tumpang tindih tugas,

wewenang dan tanggung jawab. Berikut ini ditampilkan struktur organisasi Kantor Pemerintahan Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebagai berikut :



Sumber : Kantor Camat Datuk Bandar Tahun 2020

Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pemerintahan Kecamatan Datuk Bandar

Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing aparatur kecamatan Datuk Bandar adalah sebagai berikut :

1. Camat
  - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
  - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
  - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
  - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
  - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan

- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan kelurahan/desa
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.
  - h. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Camat
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan kesekretariatan
  - b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program Kecamatan
  - c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan
  - d. Kecamatan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan Kecamatan
  - e. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Kecamatan
  - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian
  - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kesekretariatan
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan sub bagian umum
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum
  - c. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan penyelenggaraan kerumah tanggaan Kecamatan
  - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian

- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian
  - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
  - g. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya
4. Sub Bagian Program dan Keuangan
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Sub Bagian Keuangan
  - b. Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan
  - c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan pemrosesan pengusulan dan verifikasi
  - d. Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan
  - e. Penyusunan laporan keuangan Kecamatan
  - f. Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian
  - g. Penyiapan bahan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Seksi Pemerintahan
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Tata Pemerintahan.
  - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup tata pemerintahan.
  - c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.
  - e. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi Negara dan kesatuan bangsa.
  - f. Penyiapan bahan pembinaan di bidang keagrariaan.
  - g. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi kependudukan.
  - h. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi kecamatan dan kelurahan.
  - i. Pelaksanaan proses pelayanan administrasi lainnya lingkup tata pemerintahan.
  - j. Pemantauan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
  - k. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
  - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - c. Penyiapan bahan pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
  - d. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dalam penyelenggaraan dalam Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pengamanan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kecamatan
  - e. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat



- f. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya
- g. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 7. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup Seksi Kesejahteraan Sosial
- c. Penyiapan bahan pembinaan Seksi Kesejahteraan Sosial
- d. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup Kesejahteraan Sosial
- e. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kepemudaan, kebudayaan, olahraga, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan sosial lainnya
- f. Membantu pelaksanaan tugas-tugas penanggulangan bencana alam dan bencana lainnya
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 8. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- a. Penyusunan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- b. Penyusunan bahan dan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan masyarakat

- c. Penyiapan bahan pembinaan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Perekonomian Koperasi Usaha Mikro, kecil dan menengah
- d. Pelaksanaan proses pelayanan masyarakat lingkup pemberdayaan masyarakat
- e. Penyiapan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.1.3. Laporan Kinerja Kantor Camat Datuk Bandar**

Laporan kinerja Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung merupakan laporan yang menginformasikan hasil kerja Kantor Camat Datuk Bandar dalam satu periode. Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah ini terhadap penggunaan APBD dan kinerja operasional lainnya kepada publik dan kepada pemprov.

Laporan kinerja instansi pemerintah ini menggambarkan keberhasilan yang telah dicapai, dan kegagalan/ketidakberhasilan instansi tersebut dalam menyelesaikan program kerja yang telah disusun sebelumnya. Ukuran keberhasilan kinerja baik keuangan maupun non keuangan menjadi penilaian tersendiri bagi instansi pemerintah dalam memegang amanah yang diberikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai terdiri dari :

## 1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan langkah awal dalam sistem pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kantor Camat Datur Bandar Kota Tanjung Balai, yang sekaligus menjadi sarana pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada *stakeholder* terkait terhadap seluruh aktivitas. Rencana strategis memuat visi dan misi sebagai acuan dan pedoman arah pelaksanaan kegiatan.

Rencana strategis senantiasa memprediksi perkembangan isu yang senantiasa berubah dan berkembang di masyarakat. Rencana strategis harus dengan cermat memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara internal maupun eksternal yang dirumuskan dalam bentuk sistemik, kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman.

Visi dan misi Kecamatan Datur Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan pada rencana strategis adalah sebagai berikut :

- a. Aparatur yang bersih dan mempunyai integritas yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme.
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ramah, santun, dan rasa kekeluargaan. Mengedepankan komunikasi dengan baik dalam memberikan pelayanan serta sinergitas mitra kerja.
- c. Konsisten dalam melaksanakan tugas dengan target terukur, memberikan kepastian pelayanan kepada warga masyarakat secara profesional, proporsional, serta inovasi secara berkelanjutan.
- d. Kecamatan Datur Bandar sebagai kecamatan yang terdepan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan Tanjung Balai Juara.

## 2. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Rumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

## 3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan kondisi yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun, dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu rencana kerja. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus dalam penyusunan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan operasional organisasi.

Sasaran strategis Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai adalah :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan
- b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Kecamatan dan Kelurahan

Sasaran strategis Kecamatan Datuk Bandar disusun melalui program kerja yang dilaksanakan, seperti :

- a. Program pelayanan administrasi perkantoran
  - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatut
  - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - d. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
  - e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
  - f. Program peningkatan kualitas pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
4. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Tabel 4.1 : Sasaran dan Indikator Kinerja Kantor Camat Datuk Bandar

No.	Sasaran	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan	a.Jumlah kelompok masyarakat yang dibina di Kecamatan. b.Cakupan PKK aktif tingkat Kecamatan c.Rumah tangga ber PHBS d.Partisipasi Musrenbang tingkat Kecamatan
2	Meningkatnya kualitas sumber daya Kecamatan dan Kelurahan	a.Ketersediaan data base informasi Kecamatan dan Kelurahan b.Pemenuhan kebutuhan aparatur Kecamatan dan Kelurahan
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan dan Kelurahan	a.Nilai IKM terhadap pelayanan publik b.Cakupan Monitoring trantibum tingkat Kecamatan c.Cakupan data kepemilikan tanah di Kecamatan

Sumber: LAKIP Kantor Camat Datuk Bandar (penelitian tahun 2020)

#### 5. Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja Kantor Kecamatan Datuk Bandar adalah perwujudan kewajiban Kantor Kecamatan Datuk bandar untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan.

Kinerja Kantor Kecamatan Datuk Bandar tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sasaran kinerja diukur dengan mengaplikasikan dalam indikator kinerja dan target kinerja. Realisasi akhir tahun akan menunjukkan keseluruhan kondisi pencapaian sasaran. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja Kecamatan Datuk bandar dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

#### 6. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Kinerja Kantor Kecamatan Datuk bandar Kota Tanjung Balai tercermin dalam pencapaian sasaran-sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tersebut selama tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :

- a. Kelancaran kegiatan kantor
- b. Tersedianya sarana dan prasarana kantor
- c. Tersusunnya dokumen perencanaan dan laporan keuangan SKPD
- d. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Kecamatan
- e. Terselenggaranya koordinasi pemerintah Desa dan meningkatkan kualitas SDM dalam pengetahuan, kemampuan, serta tersedianya data yang akurat.
- f. Terselenggaranya pelayanan administrasi masyarakat
- g. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintah Kecamatan

#### 4.1.4. Deskripsi Statistik Opini Responden

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebanyak 20 orang/sampel. Deskripsi responden diperoleh dari hasil jawaban/opini sebaran kuesioner kepada seluruh responden. Statistik deskriptif dipergunakan untuk melihat gambaran sebaran data jawaban/opini responden yang mendeskripsikan kondisi yang mereka alami, temui atau rasakan di lapangan pekerjaannya. Data-data opini responden tersebut yang dihasilkan dalam penelitian, mulai dari maksimum, minimum, *mean* dan standar deviasi. Dengan menggunakan aplikasi SPSS, maka diperoleh statistik deskriptif jawaban responden sebagai berikut :

Tabel 4.2.  
Deskriptif Nilai Rata-rata Opini Responden

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Instansi Pemerintah	31,5500	6,05653	20
Sistem Informasi Akuntansi	34,4500	7,89720	20
Standar Akuntansi Pemerintah	34,2000	8,10198	20

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif di atas, menjelaskan bahwa nilai N sebesar 20 menunjukkan jumlah sampel yang diteliti. *Mean* adalah total nilai dari keseluruhan jawaban kuesioner yang diberikan responden. Untuk mendapatkan nilai *mean* ditentukan dengan membagi nilai *mean* dengan jumlah sampel (N). *Standar deviasi* adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data dalam sampel, dan seberapa dekat titik data individu ke *mean* atau rata-rata nilai sampel.

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 20 sampel yang digunakan dalam penelitian ini, variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

menghasilkan nilai rata-rata 31,5500. Untuk mendapatkan nilai *mean* maka dibagikan dengan jumlah pernyataan pada kuesioner variabel Y sebanyak 8 pernyataan, dan menghasilkan nilai 3,94 yang melewati angka 3 dimana rata-rata responden memberikan opini kurang setuju terhadap hasil dan upaya pencapaian kinerja instansi pemerintah yang dihasilkan selama ini.

Untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi - SIA ( $X_1$ ) menghasilkan nilai *mean* 34,4500. Apabila dibagi dengan jumlah pernyataan pada kuesioner variabel  $X_1$  sebanyak 10 pernyataan, maka akan menghasilkan nilai 3,45 yang melampaui angka 3 dimana rata-rata responden kurang setuju terhadap kondisi pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi yang ada selama ini.

Variabel Standard Akuntansi Pemerintah- SAP ( $X_2$ ) menghasilkan nilai rata-rata 34,2000. Apabila dibagi dengan 10 sesuai dengan jumlah pernyataan pada kuisioner, maka akan menghasilkan nilai 3,42 yang melewati angka 3 dimana rata-rata responden memberikan opini kurang setuju terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang ada selama ini.

#### **4.1.5. Deskripsi Data Penelitian**

Dari hasil sebaran kuesioner kepada 20 responden, diperoleh data yang merupakan opini responden terhadap kondisi variabel yang diteliti di Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar. Masing-masing pernyataan berada di rentang skoring 1 sampai dengan 5. Untuk mengetahui secara detail opini responden terhadap pernyataan kuesioner yang diajukan, akan ditampilkan sebagai berikut :

##### **1. Deskripsi Variabel Sistem Informasi Akuntansi ( $X_1$ )**

Variabel Sistem Informasi Akuntansi diukur melalui 10 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil opini



responden terhadap variabel Sistem Informasi Akuntansi dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3.  
Opini Responden  
Terhadap Variabel Sistem Informasi Akuntansi (X<sub>1</sub>)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	X <sub>1.1</sub>	6	4	4	2	4	20
		30%	20%	20%	10%	20%	100%
2.	X <sub>1.2</sub>	7	4	7	2	0	20
		35%	20%	35%	10%	0%	100%
3.	X <sub>1.3</sub>	4	4	6	5	1	20
		20%	20%	30%	25%	5%	100%
4.	X <sub>1.4</sub>	2	5	9	3	1	20
		10%	25%	45%	15%	5%	100%
5.	X <sub>1.5</sub>	2	5	7	2	4	20
		10%	25%	35%	10%	20%	100%
6.	X <sub>1.6</sub>	2	8	3	3	4	20
		10%	40%	15%	15%	20%	100%
7.	X <sub>1.7</sub>	4	9	6	0	1	20
		20%	45%	30%	0%	5%	100%
8.	X <sub>1.8</sub>	5	5	8	1	1	20
		25%	25%	40%	5%	5%	100%
9.	X <sub>1.9</sub>	5	8	7	0	0	20
		25%	40%	35%	0%	0%	100%
10.	X <sub>1.10</sub>	5	6	7	1	1	20
		25%	30%	35%	5%	5%	100%
<b>Total</b>		42	58	64	19	17	200
<b>Persentase</b>		21%	29%	32%	9,5%	8,5%	100%

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas memperlihatkan jawaban kuesioner aparat Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang memberikan opini penerapan Sistem Informasi Akuntansi di instansi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan sangat tidak setuju 8,5%, tidak setuju 19%, kurang setuju 32%, setuju 29% dan sangat setuju 21%. Jawaban mayoritas aparat kecamatan terhadap penerapan Sistem Informasi Akuntansi adalah Kurang Setuju sebanyak 32%. Indikasi ini menunjukkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan saat ini belum memberikan hasil yang maksimal.

## 2. Deskripsi Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X<sub>2</sub>)

Variabel Standar Akuntansi Pemerintah diukur melalui 10 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil opini terhadap variabel Standar Akuntansi Pemerintah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4.  
Opini Responden  
Terhadap Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (X<sub>2</sub>)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	X <sub>2.1</sub>	4	2	7	4	3	20
		20%	10%	35%	20%	15%	100%
2.	X <sub>2.2</sub>	4	8	6	2	0	20
		20%	40%	30%	10%	0%	100%
3.	X <sub>2.3</sub>	5	7	4	4	0	20
		25%	35%	20%	20%	0%	100%
4.	X <sub>2.4</sub>	7	5	4	4	0	20
		35%	25%	20%	20%	0%	100%
5.	X <sub>2.5</sub>	4	4	5	3	4	20
		20%	20%	25%	15%	20%	100%
6.	X <sub>2.6</sub>	4	2	5	5	4	20
		20%	10%	25%	25%	20%	100%
7.	X <sub>2.7</sub>	6	5	5	4	0	20
		30%	25%	25%	20%	0%	100%
8.	X <sub>2.8</sub>	6	3	9	1	1	20
		30%	15%	45%	5%	5%	100%
9.	X <sub>2.9</sub>	4	5	10	0	1	20
		20%	25%	50%	0%	5%	100%
10.	X <sub>2.10</sub>	6	4	5	2	3	20
		30%	20%	25%	10%	15%	100%
<b>Total</b>		50	45	60	29	16	200
<b>Persentase</b>		25%	22,5%	30%	14,5%	8,0%	100,0%

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas memperlihatkan jawaban kuesioner pegawai Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang memberikan opini penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di instansi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan sangat tidak setuju 8%, tidak setuju 14,5%, kurang setuju 30%, setuju 22,5% dan sangat setuju 25%. Jawaban mayoritas aparat kecamatan terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah adalah

Kurang Setuju sebanyak 30%. Indikasi ini menunjukkan bahwa penerapan dan pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah saat ini belum menunjukkan keberhasilan yang memuaskan.

### 3. Deskriptif Variabel Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Variabel Kualitas Laporan Keuangan diukur melalui 8 buah pertanyaan yang mempresentasikan indikator-indikator dari variabel tersebut. Hasil opini terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5.  
Tanggapan Responden  
Terhadap Variabel Kinerja Instansi Pemerintah(Y)

No	Pertanyaan	Skor					Jumlah
		SS	S	KS	TS	STS	
1.	Y <sub>1</sub>	6	2	3	7	2	20
		30%	10%	15%	35%	10%	100%
2.	Y <sub>2</sub>	8	4	6	1	1	20
		40%	20%	30%	5%	5%	100%
3.	Y <sub>3</sub>	9	6	5	0	0	20
		45%	30%	25%	0%	0%	100%
4.	Y <sub>4</sub>	11	4	5	0	0	20
		55%	20%	25%	0%	0%	100%
5.	Y <sub>5</sub>	14	2	3	1	0	20
		70%	10%	15%	5%	0%	100%
6.	Y <sub>6</sub>	9	6	4	0	1	20
		45%	30%	20%	0%	05%	100%
7.	Y <sub>7</sub>	10	4	5	1	0	20
		50%	20%	25%	5%	0%	100%
8.	Y <sub>8</sub>	7	1	7	2	3	20
		35%	5%	35%	10%	15%	100%
<b>Total</b>		74	29	38	12	7	160
<b>Persentase</b>		46,25%	18,13%	23,75%	7,5%	4,37%	100%

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas memperlihatkan jawaban kuesioner pegawai Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai yang memberikan opini hasil Kinerja Instansi Pemerintah di instansi tersebut. Hasil yang diperoleh menunjukkan sangat tidak setuju 4,37%, tidak setuju 7,5%, kurang setuju 23,75%, setuju 18,13% dan sangat setuju 46,25%. Jawaban mayoritas

aparatur kecamatan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah adalah Sangat Setuju sebanyak 46,25%. Indikasi ini menunjukkan bahwa Kinerja Instansi Pemerintah yang dihasilkan selama ini telah memenuhi ketentuan yang berkualitas.

#### 4.1.6. Hasil Uji Data Penelitian

##### 4.1.6.1. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Untuk memastikan data penelitian yang digunakan layak atau tidak digunakan dalam penelitian ini, maka dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas untuk membuktikannya.

##### 4.1.6.1.1. Hasil Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya setiap pernyataan dalam kuesioner. Pengujian data penelitian dengan uji validitas dilakukan dengan menggunakan rumus *product moment* dengan media SPSS. Dengan standar  $r$  tabel  $N-2$  dengan signifikansi 0,05 maka diperoleh  $r$  tabel = 0,37. Hasil pengujian validitas selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6.  
Hasil Uji Validitas Data Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sistem Informasi Akuntansi (X <sub>1</sub> )	X <sub>1.1</sub>	0.486	0.37	Valid
	X <sub>1.2</sub>	0.697	0.37	Valid
	X <sub>1.3</sub>	0.648	0.37	Valid
	X <sub>1.4</sub>	0.623	0.37	Valid
	X <sub>1.5</sub>	0.566	0.37	Valid
	X <sub>1.6</sub>	0.516	0.37	Valid
	X <sub>1.7</sub>	0.619	0.37	Valid
	X <sub>1.8</sub>	0.674	0.37	Valid
	X <sub>1.9</sub>	0.703	0.37	Valid
	X <sub>1.10</sub>	0.609	0.37	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah (X <sub>2</sub> )	X <sub>2.1</sub>	0.623	0.37	Valid
	X <sub>2.2</sub>	0.616	0.37	Valid
	X <sub>2.3</sub>	0.529	0.37	Valid
	X <sub>2.4</sub>	0.639	0.37	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0.577	0.37	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0.519	0.37	Valid
	X <sub>2.7</sub>	0.609	0.37	Valid
	X <sub>2.8</sub>	0.634	0.37	Valid
	X <sub>2.9</sub>	0.539	0.37	Valid

	X <sub>2-10</sub>	0.476	0.37	Valid
Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Y <sub>1</sub>	0.413	0.37	Valid
	Y <sub>2</sub>	0.562	0.37	Valid
	Y <sub>3</sub>	0.614	0.37	Valid
	Y <sub>4</sub>	0.740	0.37	Valid
	Y <sub>5</sub>	0.628	0.37	Valid
	Y <sub>6</sub>	0.608	0.37	Valid
	Y <sub>7</sub>	0.609	0.37	Valid
	Y <sub>8</sub>	0.473	0.37	Valid

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Uji validitas dilakukan terhadap opini 20 responden atas pertanyaan dalam kuesioner. Nilai standar untuk r-tabel n-2 signifikan 5%, sehingga nilai r-tabel untuk  $n = (20-2)$  adalah 0.37. Tabel di atas memperlihatkan semua nilai r-hitung  $>$  r-tabel. Itu artinya untuk seluruh instrumen pertanyaan yang digunakan untuk mengukur setiap pertanyaan kuesioner adalah valid atau sah untuk digunakan dalam penelitian. Variabel penelitian mempunyai koefisien korelasi yang lebih besar daripada r-tabel (r-hitung  $>$  r-tabel)

#### 4.1.6.1.2. Uji Realiabilitas

Uji Reliabilitas adalah untuk mengukur stabilitas dan konsistensi sampel/responden menjawab kuesioner. Hasil dari uji reliabilitas setiap pertanyaan dalam kuesioner ditampilkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.7.  
Hasil Uji Reliabilitas Data Penelitian

No	Variabel	Cronbach Alpha	r-tabel	Keterangan
1	Sistem Informasi Akuntansi	0,874	0,60	Reliabel
2	Standar Akuntansi Pemerintah	0,859	0,60	Reliabel
3	Kinerja Instansi Pemerintah	0,827	0,60	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa semua variabel yang diuji menghasilkan nilai koefisien Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 yang

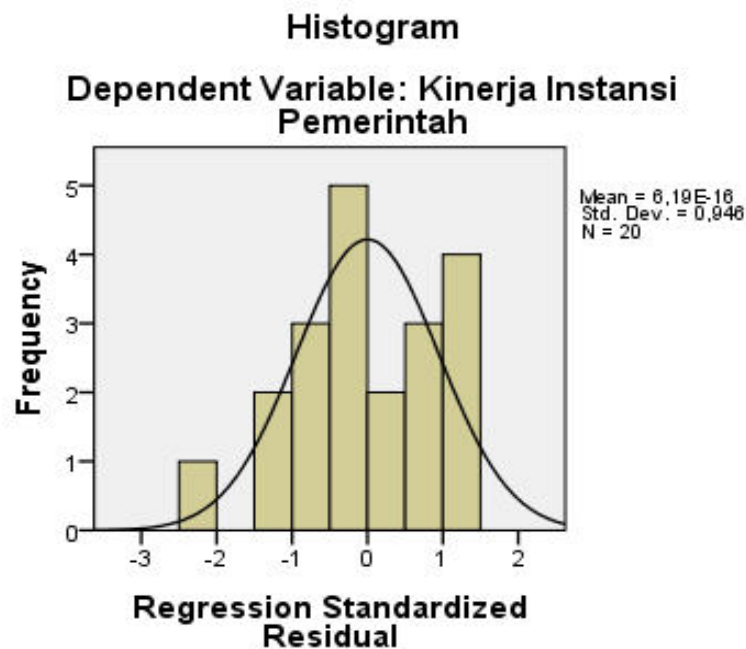
merupakan nilai standar reliabel sebuah data kuesioner. Dengan demikian disimpulkan bahwa semua data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel dan layak digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.1.6.2. Uji Asumsi Klasik

Beberapa uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan data penelitian untuk digunakan. Uji Asumsi Klasik yang digunakan terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskedastisitas.

##### 4.1.6.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas terhadap data penelitian digunakan untuk menguji apakah distribusi/penyebaran data telah tersebar secara normal. Uji normalitas yang memenuhi persyaratan apabila data telah tersebar secara merata dan normal. Hasil uji normalitas dengan grafik histogram ditampilkan sebagai berikut :



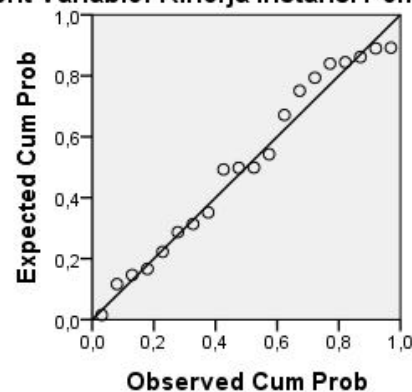
Gambar 4.2: Grafik Histogram Normalitas Data

Berdasarkan pada grafik histogram tersebut di atas, bahwa data yang bersumber dari jawaban *kuesioner* responden telah terdistribusi secara normal. Pembuktiannya dapat dilihat dari garis histogram yang memiliki kecembungan yang seimbang atau berada di tengah. Dengan kondisi yang demikian maka disimpulkan bahwa data penelitian dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji normalitas data dapat juga dilihat dari kurva normal P-Plot yang dihasilkan dari out put proses data dengan menggunakan SPSS. Hasil uji data dengan kurva normal P-Plot dapat ditampilkan sebagai berikut :

**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

**Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah**



Gambar 4.3: Kurva Normal P.Plot

Berdasarkan Kurva Normal P-Plot tersebut di atas, terlihat sebaran data mengikuti garis diagonal. Dengan menggunakan kurva tersebut data dikatakan telah tersebar secara normal jika data yang tersebar mengikuti garis diagonal. Maka dengan melihat kondisi kurva P-Plot tersebut maka data dalam penelitian ini telah tersebar normal dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

Uji Normalitas data dapat juga dilihat dari uji *Kolmogorov Smirnov*.

Hasil uji data tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.8  
Hasil Uji Kolmogorov Smirnov

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,96006659
Most Extreme Differences	Absolute	,113
	Positive	,096
	Negative	-,113
Test Statistic		,113
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Syarat diterimanya Uji normalitas data dengan Kolmogorov Smirnov dikatakan data berdistribusi normal apabila nilai Asymp. sig.(2-tailed) menghasilkan nilai  $> 0,05$  (5%) atau nilai *Unstandardized Residual*  $> 0,05$ . Tabel di atas menunjukkan hasil uji normalitas data dengan Uji Kolmogorov Smirnov menghasilkan Asymp.sig 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian data penelitian telah terdistribusi secara normal, sehingga dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.1.6.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi korelasi regresi jawaban kuesioner variabel bebas dengan variabel terikat. Model yang baik, tidak terjadi korelasi regresi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Apabila ditemukan korelasi diantara variabel bebas dengan variabel terikat maka ada masalah dari data yang diteliti. Hasil uji Multikolinearitas dengan SPSS ditampilkan sebagai berikut :



Tabel 4.9.  
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Sistem Informasi Akuntansi	,345	2,902
Standar Akuntansi Pemerintah	,345	2,902

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

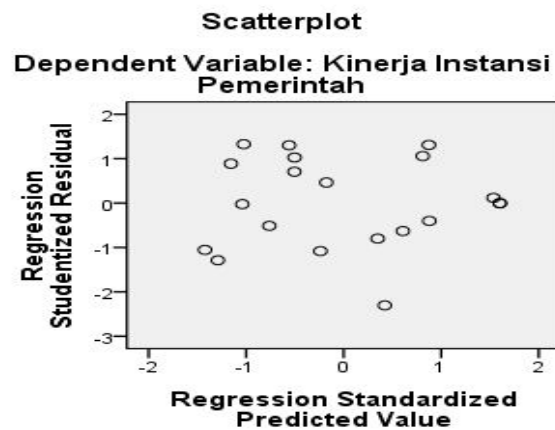
Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Hasil Uji Multikolinieritas yang ideal apabila nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di bawah 1. Berdasarkan kondisi yang demikian maka tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Variabel Sistem Informasi Akuntansi ( $X_1$ ) nilai *tolerance* yang dihasilkan sebesar 0,345 (di bawah 1) dan nilai VIF sebesar 2,902 (di bawah 10), sehingga data penelitian untuk variabel Sistem Informasi Akuntansi terbebas dari gejala multikolinieritas.
2. Variabel Standar Akuntansi Pemerintah ( $X_2$ ) nilai *tolerance* yang dihasilkan sebesar 0.345 (masih di bawah 1), dan Nilai VIF sebesar 2,902 (masih di bawah 10), sehingga data penelitian untuk variabel Standar Akuntansi Pemerintah terbebas dari gejala multikolinieritas.

#### 4.1.6.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi kesamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Untuk mendeteksi apakah data bersifat heteroskedastisitas, maka dilihat dari grafik Scatter-Plot. Model yang baik adalah jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, atau menyempit. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 4.4: Grafik Scater Plot Heteroskedastisitas

Berdasarkan grafik scatterplot tersebut di atas menunjukkan sebaran data tersebar ke segala arah, tidak membentuk pola tertentu, dan titik-titik tersebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Kondisi ini telah memenuhi syarat model regresi heteroskedastisitas yang baik. Dengan demikian disimpulkan bahwa hasil uji heteroskedastisitas telah memenuhi model regresi yang ideal.

#### 4.1.6.3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui korelasi variabel bebas ( $X_1$ ) dan ( $X_2$ ) terhadap variabel terikat ( $Y$ ). Hasil uji regresi linier berganda ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.10.  
 Koefisien Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7,721	3,318		2,327	,033
Sistem Informasi Akuntansi	,343	,155	,447	2,212	,041
Standar Akuntansi Pemerintah	,352	,151	,471	2,330	,032

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah  
 Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dimasukkan ke dalam persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 7,721 + 0,343 X_1 + 0,352 X_2$$

Persamaan linier di atas menjelaskan bahwa pengaruh sistem informasi akuntansi ( $X_1$ ) positif dan searah dengan kinerja instansi pemerintah. Penjelasannya adalah jika sistem informasi akuntansi meningkat sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,343 satuan. Untuk variabel standar akuntansi pemerintah ( $X_2$ ), apabila meningkat sebesar satu satuan, maka akan memberi pengaruh positif pada kenaikan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,352 satuan. Dengan demikian kedua variabel bebas (Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah) memiliki koefisien korelasi positif terhadap variabel Y (kinerja instansi pemerintah).

#### **4.1.6.4. Hasil Uji Hipotesis**

Untuk membuktikan hipotesis penelitian, maka dilakukan uji hipotesis melalui Uji Parsial (uji-t) dan Uji Simultan (uji-F).

##### **4.1.6.4.1. Hasil Uji Parsial (Uji-t)**

Uji parsial (uji-t) dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab terdahulu. Uji parsial membuktikan hipotesis hubungan secara individual masing-masing variabel bebas (Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah) terhadap variabel terikat (Kinerja Instansi Pemerintah). Hasil Uji Hipotesis secara parsial terhadap masing-masing variabel ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.11.  
Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	7,721	3,318		2,327	,033
Sistem Informasi Akuntansi	,343	,155	,447	2,212	,041
Standar Akuntansi Pemerintah	,352	,151	,471	2,330	,032

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah  
Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Hasil Uji Parsial variabel Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh hasil sig.t 0,041 < 0,05 dan t-hitung 2,212 > t-tabel 1,739. Hasil uji Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah sig.t 0,032 < 0,05 dan t-hitung 2,330 > t-tabel 1,739. Ketentuan mempersyaratkan bahwa diterimanya hipotesa uji parsial apabila sig.t yang dihasilkan < 0,05 dan t-hitung > t-tabel. Maka dari uji-t di atas untuk kedua variabel bebas (Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga hipotesis kedua variabel terbukti dan dapat diterima.

#### 4.1.6.4.2. Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Uji simultan (uji-F) dilakukan untuk menjawab hipotesis yang telah diajukan pada bab terdahulu. Uji simultan membuktikan hipotesis hubungan secara bersama-sama variabel bebas (Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah) terhadap variabel terikat (Kinerja Instansi Pemerintah) diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan.

Hasil Uji Hipotesis secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.12.  
Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	530,472	2	265,236	27,085	,000 <sup>b</sup>
Residual	166,478	17	9,793		
Total	696,950	19			

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Dari uji simultan (Uji-F) diperoleh hasil seperti yang ditampilkan tabel 4.11 tersebut di atas. Hasil proses data menunjukkan nilai sig.F  $0,000 < 0,05$  dan F-hitung  $27,085 > F\text{-tabel } 3,59$ . Ketentuan mempersyaratkan apabila sig.F  $< 0,05$  dan t-hitung  $> F\text{-tabel}$  maka hipotesis diterima. Dengan demikian hasil uji data dengan uji simultan disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan pada bagian terdahulu dapat diterima. Artinya Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 4.1.6.5. Hasil Uji Determinasi

Uji Determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi variabel bebas Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap variabel terikat Kinerja Instansi Pemerintah dapat ditampilkan sebagai berikut :

Tabel 4.13.  
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,872 <sup>a</sup>	,761	,733	3,12935

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi Pemerintah

b. Predictors: (Constant), Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah).

Nilai R Square yang mewakili nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,761 atau 76,1%. Koefisien determinasi memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan apabila berada pada posisi  $0 \leq R^2 \leq 1$ , yang artinya koefisien determinasi berada di antara 0 sampai dengan 1. Yang demikian itu menjelaskan bahwa variabel bebas Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah mampu menjelaskan secara signifikan terhadap variabel Kinerja Instansi Pemerintah sebagai variabel terikat sebesar 76,1% dari berbagai macam faktor lainnya yang mempengaruhi Kinerja Instansi Pemerintah di Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, dan sisanya 23,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

#### **4.2. Pembahasan**

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh instansi pemerintah merupakan sebuah tanggung jawab yang mau tidak mau harus dilakukan, untuk menjamin kinerja institusi pemerintah yang berkualitas. Kendala yang umum yang terjadi, ketika aparatur yang berperan dalam proses penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah memiliki keterbatasan kapasitas dan kapabilitas yang minim, sehingga tidak dapat sepenuhnya menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan negara dalam bentuk laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.

Aparatur kecamatan belum mampu sepenuhnya menjamin kinerja instansi pemerintah melalui informasi keuangan yang berkualitas, yang disebabkan karena keterbatasan dalam pemahaman dasar akuntansi dan keuangan serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Oleh karena itu, kualitas sumber daya manusia (aparatur sipil negara) merupakan kunci dalam pemerintahan kecamatan untuk terciptanya kinerja instansi pemerintahan. Peranan pengendalian (kontrol) yang lemah terhadap tahapan input, proses, dan output dalam operasional sistem informasi akuntansi, serta kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah yang rendah, semakin memperburuk pencapaian kinerja instansi pemerintah yang diharapkan.

Pembahasan hasil olah data penelitian yang telah dianalisis melalui uji hipotesis pada bagian sebelumnya terhadap hubungan antara variabel bebas (Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah) dengan variabel terikatnya (Kinerja Instansi Pemerintah) akan diuraikan dalam pembahasan masing-masing.

#### **4.2.1. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Instansi**

##### **Pemerintah**

Kinerja instansi pemerintah merupakan hasil kerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diterimanya. Kinerja instansi pemerintah dapat dinilai dari Laporan keuangan yang dihasilkannya, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kedua bentuk laporan tersebut harus disusun dan disampaikan kepada stakeholder sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam satu periode.

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan sarana informasi keuangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Sehingga penyajian laporan keuangan instansi pemerintah harus merepresentasikan pertanggungjawaban APBD yang realistis, dapat dipertanggungjawabkan, dan terhindar dari unsur rekayasa laporan keuangan. Ini merupakan salah satu bentuk menjaga kualitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban APBD dalam bentuk laporan keuangan merupakan output (keluaran) dari implementasi sistem akuntansi pemerintah. Begitu pentingnya menjaga kualitas laporan keuangan, sehingga itu sama dengan menjaga implementasi penggunaan sistem informasi akuntansi. Penggunaan sistem informasi akuntansi memenuhi unsur-unsur yang ditentukan akan lebih menjamin pencapaian laporan keuangan yang berkualitas, yang berdampak pada pencapaian kinerja instansi pemerintah yang berkualitas pula.

Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 menjelaskan bahwa laporan keuangan sektor publik merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan negara dan daerah selama satu periode tertentu. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, dan menjamin bahwa sumber daya yang tersedia telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, telah digunakan dengan prinsip efektif dan efisien, dan dijadikan alat komunikasi dan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk menjamin kinerja instansi pemerintah yang meningkat, harus diikuti dengan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk memenuhi kondisi



tersebut, maka kehadiran Sistem Informasi Akuntansi diharapkan mampu memenuhi pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut. Dukungan Pemerintah terhadap upaya pencapaian kinerja instansi yang meningkat melalui laporan keuangan sektor publik yang berkualitas tersebut, didukung dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang menegaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintahan. Krismiaji (2010) menambahkan bahwa Sistem Informasi Akuntansi yang dibangun seminimal mungkin dapat memenuhi tujuan dari sisi kemanfaatan, ekonomis, daya andal, ketersediaan, service pelanggan, kapasitas, praktis, fleksibel, daya telusur, daya audit dan keamanan.

Begitu kompleksnya maksud dan tujuan dibangunnya Sistem Informasi Akuntansi, sehingga dibutuhkan investasi yang relatif besar untuk mengadakannya. Pelaksana organisasi formal termasuk lembaga sektor publik Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, setidaknya dapat memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi yang sudah dibangun semaksimal mungkin tersebut, untuk dapat menjadi penunjang menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana negara/masyarakat, dan perwujudan upaya pencapaian kinerja instansi pemerintah. Sistem Informasi Akuntansi akan memberikan manfaat yang maksimal apabila para aparatur yang terlibat langsung dalam sistem tersebut, memiliki pemahaman yang baik dan profesional dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap sistem tersebut.

Berdasarkan sebaran jawaban/opini responden terhadap pertanyaan kuesioner variabel Sistem Informasi Akuntansi dalam prakteknya, menghasilkan opini/jawaban sebagai berikut :

Tabel 4.14  
Opini Responden Untuk Variabel Sistem Informasi Akuntansi

No	Opini	Positif	Negatif
1	Pemahaman Sistem Informasi Akuntansi secara umum	50%	50%
2	Minat Belajar Sistem Informasi Akuntansi	45%	55%
3	Cenderung Mengikuti Prosedur Sistem Informasi Akuntansi	40%	60%
4	Pemahaman Instruksi dalam Sistem Informasi Akuntansi	35%	65%
5	Jaminan SIA terhadap Kinerja Instansi Pemerintah	35%	65%
6	Ketergantungan pada Sistem Informasi Akuntansi	50%	50%
7	Software Sistem Informasi Akuntansi telah sesuai kebutuhan	65%	35%
8	Pemahaman Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi	50%	50%
9	Sistem Informasi Akuntansi mampu menyimpan data cukup besar	65%	35%
10	Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi	55%	45%

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah)

Dari tabel di atas poin 1 sampai dengan 6 perlu dilakukan pembahasan secara khusus. Terdapat 50% responden belum memahami secara umum Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan selama ini. Minat untuk mempelajari Sistem Informasi Akuntansi relatif rendah hanya 45%. Responden cenderung tidak mengikuti prosedur yang berlaku dalam Sistem Informasi Akuntansi (60%). Sebanyak 65% responden belum memahami secara detail internal Sistem Informasi Akuntansi. Responden 65% tidak meyakini bahwa dengan Sistem Informasi Akuntansi akan membantu meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dan 50% responden masih sangat ketergantungan dengan Sistem Informasi Akuntansi, sehingga cenderung mengabaikan pemahaman mendetail dan rinci tentang Sistem Informasi Akuntansi.

Dengan berdasarkan pada informasi di atas, maka Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai harus segera menyusun rencana baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan Sistem Informasi Akuntansi yang ada, terutama dari para pelaksana (aparatur) yang terlibat langsung dengan Sistem

Informasi Akuntansi. Hal ini dilakukan agar bentuk pertanggungjawaban keuangan negara/rakyat yang tertuang dalam laporan keuangan sekaligus keluaran dari Sistem Informasi Akuntansi, dapat menghasilkan laporan yang benar, realistis, dan berkualitas, sehingga mendapat kepercayaan dari pembacanya (pemerintah, rakyat, dan lainnya), sekaligus memberi dampak pada kinerja instansi pemerintah .

Dari hasil uji regresi linier dihasilkan informasi bahwa Sistem Informasi Akuntansi berkorelasi positif dengan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjelasan dengan data statistik memberikan korelasi bahwa jika Sistem Informasi Akuntansi dinaikkan satu satuan, maka akan menaikkan Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 0,343 satuan. Kondisi ini membuktikan bahwa kedua variabel Sistem Informasi Akuntansi memiliki korelasi sebesar koefisien regresinya (0,343). Sehingga dengan demikian menjadi penting bagi Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai untuk mempertahankan penggunaan Sistem Informasi Akuntansi karena akan mampu mendorong pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut, dengan ketentuan jika evaluasi, koreksi dan pengawasan (kontrol) terus dilakukan dengan konsisten

Melalui uji parsial variabel Sistem Informasi Akuntansi dihasilkan t-hitung 2,212 dengan signifikansi 0,041. Perhitungan t-tabel adalah 1,739. Apabila diperbandingkan maka t-hitung > t-tabel ( $2,212 > 1,739$ ) dan signifikansi  $0,041 < 0,05$ . Dengan demikian kondisi ini mempertegas bahwa Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Dengan demikian hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Hasil penelitian ini sejalan penelitian yang telah dilakukan oleh Fatmala (2014) dan Taufik (2018). Dari kedua penelitian tersebut ditarik kesimpulan yang sama bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah yang ditelitinya.

Berdasarkan hasil analisis penelitian di atas bahwa penggunaan Sistem Informasi Akuntansi di Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai secara keseluruhan belum memberikan pencapaian yang maksimal, karena masih ditemukan permasalahan penggunaannya, terutama operator yang bersentuhan langsung dengan Sistem Informasi Akuntansi tersebut. Jadi sesungguhnya benar adanya bahwa saat ini SDM Kantor Camat Datuk Bandar masih memiliki kompetensi yang rendah dalam mengoperasikan dan memahami Sistem Informasi Akuntansi.

#### **4.2.2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintah ditetapkan sebagai pedoman bagi pelaksana aktivitas akuntansi dan penyusunan laporan keuangan di lembaga/instansi publik. Bahkan standar ini telah dibakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai pedoman yang harus diikuti. Standar Akuntansi Pemerintah ini menjadi solusi dan pedoman bagi pencatatan keuangan di lembaga /instansi publik, agar tujuan laporan keuangan sebagai alat informasi dan pertanggungjawaban keuangan negara/rakyat memiliki kualitas yang memadai dan terhindar dari tindakan kesalahan fatal, dan tindakan rekayasa/manipulasi lainnya. Jika kesalahan atau pun manipulasi terjadi dalam laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut akan menghasilkan informasi keuangan yang

menyesatkan, dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak lain akan menjadi bias, bahkan sangat dimungkinkan menghasilkan kesalahan yang fatal pula. Dampak dari itu semua akan memberi pengaruh pada kinerja instansi pemerintah.

Sebegitu pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah dihadirkan di instansi pemerintah, sehingga dikeluarkan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah di lembaga pemerintahan. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut, maka hal itu menjadi sebuah Undang-Undang yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh seluruh lembaga pemerintah/publik. Dalam hal ini pemerintah ikut turun tangan mengatur tata cara pencatatan akuntansi, terjadi keseragaman, dan yang lebih penting lagi agar hasil dari proses pencatatan akuntansi tersebut menjamin terciptanya laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung kinerja instansi pemerintah yang berkualitas pula.

Hal ini sejalan dengan manfaat Standar Akuntansi Pemerintah yang dikemukakan oleh Fakhurrazi (2010) bahwa manfaat yang dapat diperoleh dengan diterapkannya SAP adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada *stakeholder*.

Opini responden terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah di lembaga pemerintah (Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai) memberikan beberapa kesimpulan yang tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 4.15.  
Opini Responden Untuk Variabel Standar Akuntansi Pemerintah

No	Opini	Positif	Negatif
1	Selalu berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah	30%	70%
2	Laporan Keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah	60%	40%
3	Standar Akuntansi Pemerintah menjadi solusi masalah Akuntansi	60%	40%
4	Semua pegawai harus paham Standar Akuntansi Pemerintah	60%	40%
5	Standar Akuntansi Pemerintah membuat paham akuntansi	40%	60%
6	Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah	30%	70%
7	Standar Akuntansi Pemerintah menjamin hasil laporan keuangan	55%	45%
8	Standar Akuntansi Pemerintah membuat Laporan Keuangan dipercaya	45%	55%
9	SIA sudah mengacu pada Sistem Akuntansi Pemerintah	45%	55%
10	Kebijakan akuntansi telah merujuk pada Standar Akuntansi Pemerintah	50%	50%

Sumber : Penelitian tahun 2020 (data diolah )

Dari tabel di atas poin 1, 5 dan 6 perlu dilakukan pembahasan secara khusus. Terdapat 70% responden belum sepenuhnya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dalam menjalankan aktivitas akuntansi. Sebanyak 60% responden merasa Standar Akuntansi Pemerintah membingungkan, sehingga pengguna semakin tidak paham dengan akuntansi. Sebanyak 70% responden belum/tidak meyakini bahwa dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah.

Dengan berdasarkan pada informasi di atas, maka Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai harus segera menyusun rencana baru untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, terutama dari para pelaksana (aparatur) yang terlibat langsung dengan aktivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dilakukan karena Standar Akuntansi Pemerintah wajib dilaksanakan karena SAP merupakan sebuah undang-undang bagi lembaga publik.

Dari hasil uji regresi linier dihasilkan informasi bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berkorelasi positif dengan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjelasan dengan data statistik memberikan korelasi bahwa jika Standar Akuntansi

Pemerintah dinaikkan satu satuan, maka akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah sebesar 0,352 satuan. Kondisi ini membuktikan bahwa kedua variabel Standar Akuntansi Pemerintah memiliki korelasi sebesar koefisien regresinya (0,352). Sehingga dengan demikian menjadi penting bagi Kantor Camat Kecamatan Datuk BandarKota Tanjung Balai untuk meningkatkan penggunaan, pemahaman dan kepatuhan terhadap Standar Akunansi Pemerintah oleh para aparatur kecamatan. Apabila hal ini konsisten dilaksanakan, akan menjamin kinerja instansi pemerintah meningkat menjadi lebih baik.

Melalui uji parsial variabel Standar Akuntansi Pemerintah dihasilkan t-hitung 2,330 dengan signifikansi 0,032. Perhitungan t-tabel adalah 1,739. Apabila diperbandingkan maka  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2,330 > 1,739$ ) dan signifikansi  $0,032 < 0,05$ . Kondisi ini mempertegas bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Dengan demikian maka hipotesis yang diajukan dapat diterima.

Ditinjau dari pengaruh variabel Standar Akuntansi Pemerintah yang merupakan pedoman dalam menyajikan catatan keuangan di instansi pemerintah, maka hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tammalea (2017), dan Nasution (2019) yang keduanya menyimpulkan penelitiannya bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah di instansi yang mereka teliti.

### **4.2.3. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi**

#### **Pemerintah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah**

Kualitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan dari laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan instansi pemerintah yang diterbitkan oleh lembaga publik, menjadi salah satu tolok ukur penilaian kinerja instansi pemerintah. Keberhasilan pejabat pemerintah khususnya kepala daerah (dalam hal ini pemerintahan kecamatan) dalam menjalankan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat melalui laporan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana kedua laporan tersebut merupakan output dari sistem informasi akuntansi. Artinya kualitas kinerja instansi pemerintah yang diukur melalui laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah, secara tidak langsung menilai kinerja sistem informasi akuntansi.

Dari satu sisi, menilai kinerja sistem informasi akuntansi juga dipengaruhi oleh pemahaman, ketaatan pada ketentuan dalam hal ini Standar akuntansi pemerintah. Sehingga jika dikombinasikan seluruh elemen tersebut, akan menentukan keberhasilan kinerja instansi pemerintah secara keseluruhan.

Kinerja instansi pemerintah yang berkualitas merupakan representasi dari dipenuhinya unsur-unsur pemahaman, kepatuhan, kompetensi yang dihasilkan oleh instansi pemerintah tersebut, akan berdampak positif pada penilaian kinerja instansi pemerintah, dalam hal ini pemerintahan kecamatan.

Merujuk pada persyaratan kualitas kinerja instansi pemerintah, bahwa laporan keuangan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan praktek pengendalian



internal yang efektif. Standar Akuntansi Pemerintah merupakan kewajiban dan menjadi undang-undang untuk dilaksanakan oleh seluruh lembaga publik. Sedangkan pengendalian internal yang efektif merupakan kunci dari keberhasilan pelaksanaan Sistem Informasi Akuntansi. Artinya bahwa Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Informasi Akuntansi kedua variabel tersebut harus konsisten dijalankan apabila lembaga publik dalam hal ini kantor kecamatan Datuk Bandar ingin menghasilkan kinerja instansi pemerintah yang memiliki rapor yang baik.

Penjelasan di atas mempertegas pengaruh dan hubungan Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil uji simultan terhadap variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah tersebut memberikan hasil bahwa  $F\text{-hitung } 27,085 > F\text{-tabel } 3,59$  dan signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Kondisi ini memberikan pembuktian bahwa variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan (bersama-sama) memberi pengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Dengan demikian hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian dapat diterima.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fatmala (2014) yang menyimpulkan penelitiannya bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Dengan melakukan uji determinasi ( $R^2$ ) terhadap variabel Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah, maka koefisien determinasi yang dihasilkan sebesar 0,761. Ini membuktikan bahwa variabel

sistem informasi akuntansi dan standar akuntansi pemerintah memberikan nilai keberpengaruhannya terhadap kinerja instansi pemerintah di kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai sebesar 76,1%. Artinya bahwa koefisien determinasi tersebut menjelaskan bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah keduanya sangat memberi pengaruh secara simultan kepada kinerja instansi pemerintah jika dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka sudah cukup jelas bagi Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai bahwa Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah harus tetap dijalankan dengan konsisten, mengingat begitu pentingnya kedua variabel tersebut mendorong dan memberi pengaruh pada pencapaian kinerja instansi pemerintah yang baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Setelah melalui berbagai tahapan proses data dan analisis hasil proses data terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai, maka kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima.
2. Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima.
3. Sistem Informasi Akuntansi dan Standar Akuntansi Pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai. Artinya bahwa hipotesis yang diajukan dapat diterima.

#### **5.2. Saran**

Dalam upaya mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah yang berkualitas, maka beberapa saran perbaikan yang dapat diajukan bagi Kantor Camat Kecamatan Datuk Bandar terkait hal tersebut adalah :

1. Meningkatkan kualitas Sistem Informasi Akuntansi dengan meningkatkan kualitas SDM/SKPD (aparatur kecamatan) untuk menambah wawasan, pemahaman dan pengetahuan tentang Sistem Informasi Akuntansi, sehingga tidak sepenuhnya ketergantungan pada Sistem Akuntansi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi.
2. Mendorong dan memotivasi SKPD/aparatur kecamatan untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi. Karena Standar Akuntansi Pemerintah merupakan Undang-Undang yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur pemerintahan.
3. Pejabat kecamatan senantiasa melakukan monitoring dan pengawasan maupun evaluasi terhadap pelaksanaan praktek Sistem Informasi Akuntansi dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah, serta kualitas pemahaman oleh aparatur Kecamatan terhadap kedua variabel tersebut untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah yang berkualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Resti. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Sukabumi.
- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar. Jakarta : Erlangga.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilis. (2017). Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Proses, dan Penerapan. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Fachrurrazi. (2010). Standar Akuntansi Pemerintah. <https://fakhrurrazi.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Pebruari 2020
- Fatmala, Juanita. (2014). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Kadir, Abdul. (2014). Pengenalan Sistem Informasi. Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Krismiaji. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Ketiga. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : UII-Press
- Mangkunegara, Prabu, Anwar. (2016). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). *An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. International Journal of Management, 11(5)*.
- Mulyadi. (2016). Sistem Informasi Akuntansi. Jakarta : Salemba Empat
- Nasution, D. A. D., Barus, M. D. B., & Tasril, V. (2020). PENINGKATAN DAYA SAING BUMDES UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI DESA PEMATANG SERAI DI KECAMATAN TANJUNG PURA KABUPATEN LANGKAT. JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri), 4(3), 319-329
- Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

- Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Purba, R. B., Erlina, H. U., & Muda, I. (2020). Influence of Supply Chain Audit Quality on Audit Results through the Auditor's Ability in Detecting Corruption. *Int. J Sup. Chain. Mgt* Vol, 9(3), 1046.
- Romney, B. Marshal dan Steinbert, John, Paul. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusiadi, Rahmat Hidayat, Nur Subianto. (2014). *Metode Penelitian Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan, Konsep, Kasus dan Aplikasi SPSS, Eviews, Amos dan Lisrel*. Cetakan Ketiga. Medan: USU Press.
- Saputra, Berry Wan. (2015). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *JOM.FEKON*. Vol.2 No. 2. Universitas Riau. Pekanbaru.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Susanto, Azhar. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi (Struktur, Pengendalian, Risiko, Pengembangan)*. Bandung : Lingga Jaya
- Sutarman. (2012). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. (2013). *Organisasi dan Manajemen, Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Umar, H., Usman, S., & Purba, R. B. (2018). *The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1523-1531.
- Wahyuni, Hesti. (2018). *Pengujian Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) Dengan Menggunakan Model Delon Dan Mclean Pada Kantor Kementerian Agama Se-Provinsi Lampung*. Tesis Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung.
- Widodo, Suparno, Eko. (2015). *Manajemen Pengembangan Sumber Daya manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yesa, Putra, Teddy Arrahman. (2016). *Pengaruh Partisipasi Pemakai Dan Kemampuan Teknik Personal Akuntansi Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi (Study Empiris BUMN Pada Kota Padang Provinsi Sumatera Barat)*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Yusrianti, Hasni. (2015). *Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis* No.4 Vol.13. Universitas Sriwijaya. Palembang.